

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. UMUM

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud diarahkan untuk mencapai misi organisasi. Misi organisasi diuraikan secara detail dalam sejumlah sasaran atau target kinerja secara terukur. Capaian atas sasaran atau target kinerja itu disusun, dikaji, dianalisa dan dilaporkan secara periodik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang lazim disebut LKIP.

Pemerintah Kabupaten Manggarai selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Manggarai berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai (LKIP Kabupaten Manggarai). LKIP tersebut disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan untuk menemukan tingkat capaian sasaran strategis, tujuan dan misi yang pada akhirnya menemukan tingkat capaian visi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk satu periode RPJMD. Tingkat capaian sasaran akan menggambarkan secara jelas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran.

B. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai diukur berdasarkan tingkat capaian masing-masing sasaran dari program dan kegiatan. Perlu disampaikan pula bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini merupakan Laporan Kinerja Tahun Pertama RPJMD Periode 2016-2021. Oleh karena itu, pengukuran capaian sasaran hanya membandingkan realisasi indikator sasaran pada tahun 2016 dengan target pada tahun yang sama; realisasi tahun 2016 dengan target akhir masa RPJMD. Realisasi tahun 2016 juga akan dibandingkan dengan realisasi Nasional Tahun 2016, dengan realisasi Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Ngada atas indikator-indikator sasaran yang sama atau sejenis. Hasil pengukuran kinerja tersebut dianalisis untuk menemukan alasan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Manggarai. Poin penting dari hasil pengukuran tersebut adalah memberikan umpan balik bagi upaya memelihara keberhasilan dan perbaikan kinerja ke depan jika ditemukan kegagalan dengan berbagai permasalahannya.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan maka capaian dimaksud dibagi atas 6 (enam) KATEGORI seperti berikut :

NO.	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI/MAKNA
1.	> 85 – 100	MEMUASKAN
2.	> 75 – 85	SANGAT BAIK
3.	> 65 – 75	BAIK
4.	> 50 – 65	CUKUP BAIK
5.	> 30 – 50	KURANG
6.	0 - 30	SANGAT KURANG

Sebagaimana dijelaskan bahwa capaian sasaran dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target bagi setiap indikator yang ada. Perhitungan itu menggunakan 2 (dua) *asumsi* yakni:

- 1) Jika *semakin tinggi realisasi*, yang menunjukkan pencapaian kinerja yang *semakin baik*, atau sebaliknya *realisasi makin rendah* menunjukkan pencapaian kinerja *semakin rendah/jelek* adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2) Sedangkan apabila *semakin tinggi realisasi* menunjukkan pencapaian sasaran kinerja *semakin rendah / jelek*, atau sebaliknya realisasi *semakin rendah* pencapaian kinerja *semakin baik* menggunakan perumusan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

ATAU

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{((2 \times \text{rencana}) - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

C. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1		2		3	4	5
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Produksi Dan Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan Yang Berorientasi Pada Permintaan Pasar						
1.	Meningkatnya kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada permintaan pasar	1.1	PDRB Kabupaten Manggarai (ADHB)	Rp. 3.373.209	3.347.462,90	99,24
		1.2	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,20 %	5,14	98,85
		1.3	PDRB ADHK	Rp. 247.237.419	247.971.080	100,30
		1.4	PDRB perkapita ADHB	Rp. 9.810.442	10.470.000	106,72
		1.5	Persentase penduduk miskin	19,73 %	23,15	82,67
		1.6	Pertumbuhan Ekonomi	5,20 %	5,14	98,85
		1.7	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama Lokal lainnya per hektar	4,71 Ton/Ha	5,18	109,98
		1.8	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB (dlm juta rupiah)	Rp. 25,74	24,03	93,36
		1.9	Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,93 %	0,00	0,00
		1.10	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,95 %	8,79	98,21
		1.11	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0,5 %	0,37	74,00
		1.12	Persentase pertumbuhan industri	0,2 %	0,04	17,91
		1.13	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. 1.968.323	687.507	34,93
		Rata-rata Sasaran 1				
Tujuan 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bebas korupsi, profesional dan berbasis hukum						
2.	Meningkatnya jumlah PAD	2.1	Jumlah PAD (dalam jutaan)	Rp. 82	78,00	95,12
		2.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	5 Perda	2	40,00
		Rata-rata Sasaran 2				
Tujuan 3 Meningkatkan Produksi Perikanan						
3.	Meningkatnya produksi perikanan	3.1	Produksi perikanan	6.000 Ton	6.756,49	112,61
		3.2	Produksi perikanan budidaya :	137 TOn	118,40	86,42
			- Air tawar	115 Ton	108,25	94,13
			- Air payau	22 Ton	10,15	46,14
		3.3	Produksi rumput laut	13,00 Ton	34,40	264,62
Rata-rata Sasaran 3					154,55	
Tujuan 4 Meningkatkan Keanekaragaman Diversifikasi						
4.	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan angka kecukupan energi actual	4.1	Ketersediaan pangan utama	100,00 %	100,00	100,00
		4.2	Kontribusi produksi kelompok petani tehadaP PDRD	25,74 %	24,03	93,37
		4.3	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00 %	100,00	100,00

		4.4	Penguatan cadangan pangan	71,00 %	71,00	100,00	
		4.5	Skor pola pangan harapan (PPH)	85,90 %	85,60	99,65	
Rata-rata Sasaran 4					98,60		
Tujuan 5 Menciptakan kelancaran transportasi laut menghubungkan pelabuhan dengan destinasi laut menghubungkan pelabuhan dengan destinasi wisata pulau Flores							
5	Meningkatnya arus kunjungan wisatawan bahari pada destinasi wisata di wilayah Flores	5.1	Kunjungan wisata	100,00 %	88,24	88,24	
		5.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,79 %	3,81	482,28	
		Rata-rata Sasaran 5					285,26
6	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan jalan dan jembatan	6.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,50 Km/Unit	0,83	166,58	
		6.2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	58,34 %	59,20	101,47	
		6.3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.203.437 Orang	2.814.342	127,73	
		Rata-rata Sasaran 6					131,92
		RATA-RATA MISI I					136,00
Tujuan 6 Meningkatkan status gizi masyarakat							
7	Menurunya prevalensi kekurangan gizi (undeweight) pada anak balita	7.1	Persentase balita gizi buruk yang tertangani	100,00 %	100,00	100,00	
		7.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,99 %	54,20	83,40	
		7.3	Angka usia harapan hidup	67,79 Tahun	64,78	95,56	
		Rata-rata Sasaran 7					92,99
Tujuan 7 Menurunkan angka Kematian Ibu dan Bayi							
8.	Menurunya angka kematian bayi	8.1	Angka kematian bayi	16,13 KH	11,97	125,79	
		Rata-rata Sasaran 8					125,79
9.	Menurunya angka kematian ibu	9.1	Angka kematian ibu	126,25 KH	113,23	110,31	
		Rata-rata Sasaran 9					110,31
Tujuan 8 Meningkatkan kualitas layanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi sebagai Rs type C dan RS rujukan regional							
10.	Meningkatnya mutu layanan rumah sakit	10.1	Persentase tingkat kepuasan pelanggan	80,00 %	75,00	93,75	
		Rata-rata Sasaran 10					93,75
Tujuan 9 Menurunkan TFR (Total Fertility Rate)							
11.	Menurunya TFR	11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,35 %	3,15	105,97	
		Rata-rata Sasaran 11					105,97
Tujuan 10 Meningkatkan CPR							
12.	Meningkatnya CPR	12.1	Cakupan peserta KB aktif (CPR)	67,63 %	67,04	99,13	
		Rata-rata Sasaran 12					99,13
Tujuan 11 Menurunkan LPP kabupaten Manggarai							
13.	Menurunya laju pertumbuhan penduduk	13.1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,63 %	1,72	94,19	
		Rata-rata Sasaran 13					94,19
Tujuan 12 Menurunkan Unmet Need							
14.	Menurunnya Unmet Need	14.1	Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	15,94 %	16,41	97,05	
		Rata-rata Sasaran 14					97,05
		RATA-RATA MISI II					102,40
Tujuan 13 Meningkatkan partisipasi masyarakat pada jenjang Pendidikan PAUD,Pendidikan Dasar dan Menengah							
15.	Meningkatnya APK	15.1	APK PAUD	54,00 %	56,00	103,70	
		15.2	APK SD/MI	100,00 %	113,27	113,27	

		15.3	APK SMP/MTs	98,20 %	95,31	97,05
		15.4	APK SMA/MA/SMK	88,60 %	67,67	76,38
		Rata-rata Sasaran 15				97,60
16.	Meingkatnya APM	16.1	APM SD/MI/PAKET A	94,00 %	92,44	98,34
		16.2	APM SMP/MTs/PAKET B	71,61 %	56,86	79,40
		16.3	APM SMA/ MA/SMK/ PAKET C	62,37 %	41,49	66,53
		Rata-rata Sasaran 16				81,42
Tujuan 14 Meningkatkan rata-rata nilai UN						
17.	Meningkatnya rata-rata nilai UN	17.1	Persentase Angka kelulusan SD/MI	100,00 %	100,00	100,00
		17.2	Persentase Angka kelulusan SMP/MTs	100,00 %	100,00	100,00
		17.3	Persentase Angka kelulusan SMA/MA	100,00 %	100,00	100,00
		17.4	Persentase Angka kelulusan SMK	100,00 %	100,00	100,00
		Rata-rata Sasaran 17				100,00
Tujuan 15 Terwujudnya minat budaya baca masyarakat						
18.	Meningkatnya minat baca masyarakat	18.1	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Umum dan Pondok Baca	60.000 Orang	56.838	94,73
		Rata-rata Sasaran 18				94,73
		RATA-RATA MISI III				93,44
Tujuan 16 Menurunkan jumlah kawasan kritis didalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan						
19.	Menurunya luas lahan kritis	19.1	Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan	23.040,37 Ha	20,00	0,09
		19.2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,45 Ha	0,00	0,00
		Rata-rata Sasaran 19				0,04
Tujuan 17 Menurunkan Persentase kerusakan hutan						
20.	Menurunya Persentase kerusakan hutan	20.1	Kerusakan kawasan hutan	0,028 Ha	0,028	100
		Rata-rata Sasaran 20				100
Tujuan 18 Mengurangi pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/ kegiatan						
21.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	21.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL / HGB	10,00 %	1,80	18,00
		21.2	Persentase pencemaran mutu air	2,33 %	3,11	133,49
		Rata-rata Sasaran 21				75,75
		RATA-RATA MISI IV				58,60
Tujuan 19 Menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan						
22.	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	22.1	Persentase bantuan hukum yang tertangani	100,00 %	100,00	100,00
		22.2	Persentase penyelesaian kasus tanah	32,57 %	29,41	90,30
		Rata-rata Sasaran 22				95,15
Tujuan 20 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan						
23.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	23.1	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan :	340 Produk	621	182,65
			- Peraturan Daerah	15 Perda	11	73,33
			- Peraturan Bupati	20 Perbub	49	245,00
			- Keputusan Bupati	300 Kepbub	547	182,33
			- Instruksi Bupati	5 Inst.	14	280,00
		Rata-rata Sasaran 23				182,65
Tujuan 21	Meningkatkan pencegahan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Eksploitasi dan Perdagangan Perempuan dan Anak					

24.	Menurunya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	24.1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	83,00 %	81,11	97,72
		24.2	Persentase penyelesaian pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	90,00 %	81,11	90,12
		24.3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,046 %	0,02	162,12
		Rata-rata Sasaran 24				116,65
Tujuan 22 Meningkatkan Kesetaraan Gender Baik dalam Bidang Pembangunan, Swasta maupun Politik						
25.	Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	25.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	42,00 %	43,03	102,45
		25.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,00 %	65,83	99,74
		Rata-rata Sasaran 25				101,10
Tujuan 23 Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
26.	Meningkatnya jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi KK Miskin	26.1	Persentase rumah layak huni	87,78 %	85,55	97,46
		26.2	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	79,23 %	77,66	98,02
		26.3	Persentase Rumah Tangga pengguna listrik	71,30 %	50,17	70,36
		26.4	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	6.096 Unit	2.492	40,88
		Rata-rata Sasaran 26				67,51
27.	Meningkatnya penanganan PMKS	27.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	70,17 %	65,49	93,32
		Rata-rata Sasaran 27				93,32
Tujuan 24 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bebas Korupsi, Profesional dan Berbasis Hukum						
28.	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	28.1	Tingkat kebocoran keuangan negara/ daerah	0,40 %	0,21	147,52
		Rata-rata Sasaran 28				147,52
29.	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI	29.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI	76,38 %	66,12	86,57
		29.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	54,68 %	37,48	68,54
		Rata-rata Sasaran 29				77,56
Tujuan 25 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan						
30.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	30.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,68 %	0,70	102,70
		30.2	Rasio pasangan ber-akta nikah	0,04 %	0,037	91,95
		30.3	Kepemilikan E-KTP	66,00 %	69,83	105,80
		30.4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	247,60 %	249,68	100,84
		Rata-rata Sasaran 30				100,32
Tujuan 26 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
31.	Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	31.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,54 %	68,87	100,48
		31.2	Pencari kerja yang ditempatkan	25,56 %	16,07	62,88
		31.3	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90 Orang	90	100,00
		31.4	Rasio daya serap tenaga kerja	10,22 %	19,67	192,47
		31.5	Rasio penduduk yang bekerja	96,41 %	96,01	99,59
		Rata-rata Sasaran 31				111,08
Tujuan 27 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan						

32.	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	32.1	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	36,37 %	9,41	25,88	
		32.2	Jumlah masyarakat yang terlayani dengan program JAMKESDA	500 Orang	668	133,60	
		32.3	Angka kriminalitas	11,67 %	5,49	152,94	
		32.4	Tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) di Kabupaten Manggarai	100 %	100	100,00	
		32.5	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Manggarai	B (62,25)	CC (58,69)	94,28	
		Rata-rata Sasaran 32					101,34
		Tujuan 28 Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran					
33.	Meningkatnya pelayanan bencana	33.1	Tingkat waktu tanggap (Responsive time rate) daerah layanan wilayah manajemen bencana :				
			- Waktu tanggap : 1 x 24 jam	24 Jam	24	100,00	
			- Penanganan darurat : 3 x 24 jam	72 Jam	72	100,00	
			- Waktu perbaikan : 14 x 24 jam	336 Jam	336	100,00	
		Rata-rata Sasaran 33					100,00
		RATA-RATA MISI V					108,61
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							105,70
PREDIKAT							MEMUASKAN

Berdasarkan tabel di atas, maka secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kabupaten Manggarai tahun 2016 sebesar **105,70%** dengan kategori **MEMUASKAN**. Nilai dan kategori tersebut dihitung berdasarkan rata-rata capaian 33 sasaran. Kinerja dengan kategori MEMUASKAN merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016, yang diperoleh oleh Bupati Manggarai bersama seluruh Perangkat Daerahnya.

MISI1 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MANGGARAI DENGAN MENGOP-
TIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA
DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

1. Capaian Sasaran 1

MENINGKATNYA KUALITAS PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG BERORIENTASI PADA
PERMINTAAN PASAR

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan perkebunan bertujuan meningkatkan produksi menuju swasembada pangan secara merata; mengembangkan pola-pola produksi dan sentra-sentra produksi utama bagi perluasan kesempatan kerja dan kemampuan berusaha serta melakukan konservasi lahan bagi terjaminnya mutu sumber daya dan lingkungan. Pengembangan produksi tanaman pertanian dan

perkebunan didasarkan atas potensi dan sumber daya yang tersedia, yang diarahkan pada terciptanya produksi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Hasil produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan di Kabupaten Manggarai memberikan kontribusi yang cukup besar (24,03%) terhadap PDRB Kabupaten Manggarai.

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG BERORIENTASI PADA PERMINTAAN PASAR

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
PDRB Kabupaten Manggarai (ADHB)	Rp. 3.373.209	Rp. 3.347.462,90	99,24
Pertumbuhan PDRB ADHK	5,2	5,14	98,85
PDRB ADHK	2.472.374,19	2.479.710,80	100,30
PDRB perkapita ADHB	9.810.442	10.470.000	106,72
Persentase penduduk miskin	19,73%	20,22%	97,52
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%	5,14%	98,85
Produktivitas Padi atau bahan pangan utama Lokal lainnya per hektar	4,71	5,18	109,98
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB ADHB (Dalam Juta Rupiah)	25,74	24,03	93,36
Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,93	0	0
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,95	7,33	81,90
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0,5	0,37	74,00
Persentase pertumbuhan industry	0,2	0,04	17,91
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.968.323	687.507	34,93
RATA-RATA			78,08
KATEGORI			SANGAT BAIK

1. Indikator terkait PDRB

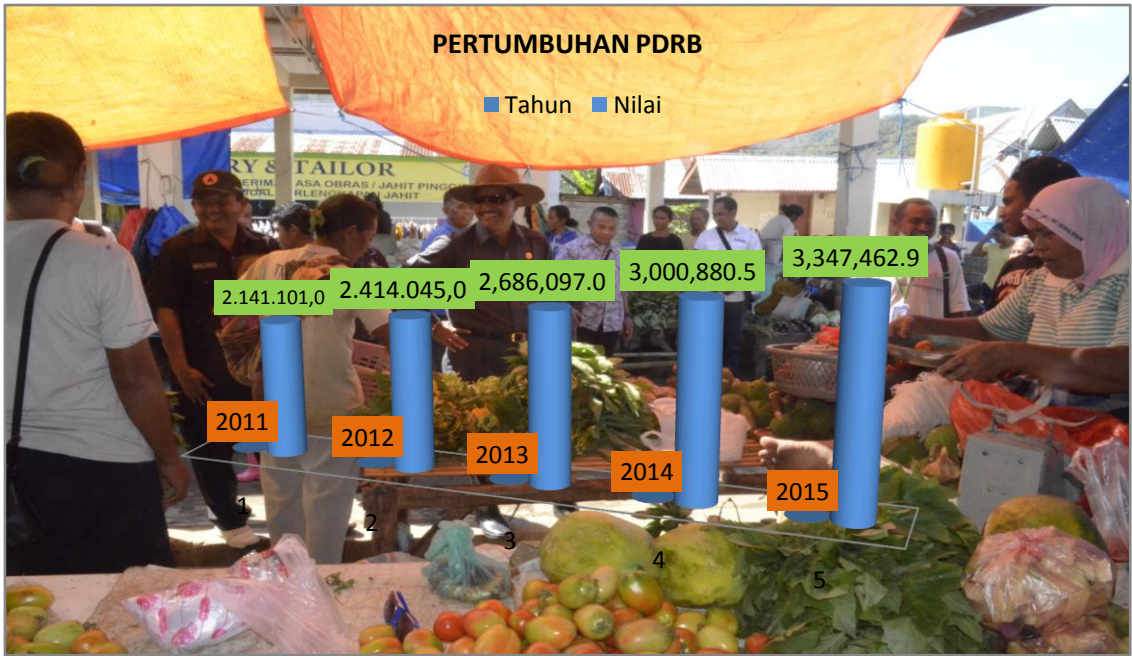
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah (provinsi, kabupaten atau kecamatan) dalam menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

PDRB juga terdiri atas 2 (dua) versi penilaian, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Pada PDRB versi atas dasar harga berlaku, produk-produk yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi dinilai dengan menggunakan harga yang sedang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan versi atas harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun

dasar tertentu. Hingga saat ini PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010.

Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai (ADHB)



Sumber: Manggarai Dalam Angka 2016 BPS

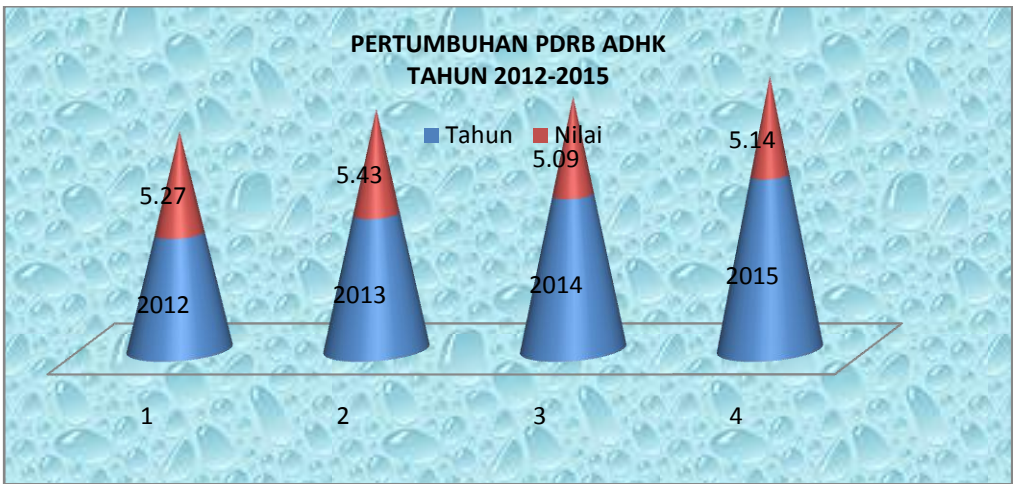
Berdasarkan grafik 3.1 di atas, PDRB Kabupaten Manggarai mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun walaupun tidak signifikan (Rp.3.347.462,90 tahun 2015). Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur yang mencapai Rp.2.342.289,08

2. **Indikator Pertumbuhn PDRB ADHK**

Manggarai menunjukkan adanya peningkatan pada Tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015, dengan tingkat kenaikan mencapai 0.97%. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2% dan terealisasi 5,14% dengan tingkat capaian 98,85% atau kategori **MEMUASKAN**. Artinya bahwa di tahun 2016 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6% dari tahun 2015. Hal ini dipicu oleh realisasi belanja, investasi pasar dan pertumbuhan sektor-sektor riil yang baru mulai dikembangkan. Demikian pula dengan komponen pendukung pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah mulai meningkat. Target pertumbuhan ekonomi pada dokumen RPJMD tahun 2021 sebesar 5,29% maka angka

capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai harus dipacu peningkatannya minimal sebesar 0,15% selama lima tahun ke depan.

Grafik 3.2
Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK



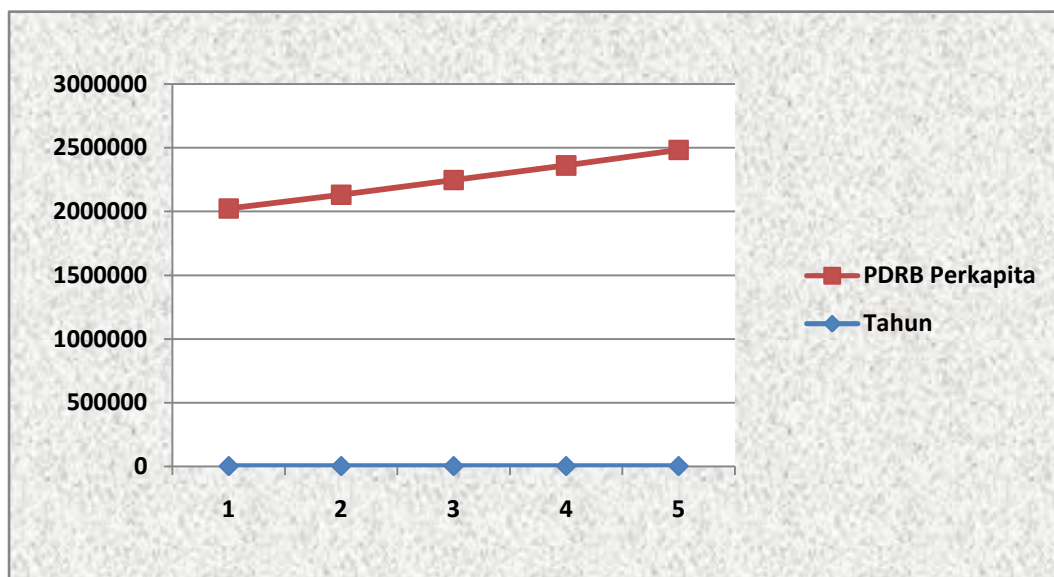
Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi adalah naiknya produksi hasil pertanian secara umum (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan). Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai masih didominasi oleh sektor pertanian sehingga apabila produksi hasil pertanian naik maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan ; Demikian pula sebaliknya apabila produksi hasil pertanian turun maka pertumbuhan ekonomi juga menjadi lambat.

3. Indikator PDRB ADHK

Sesuai data Manggarai Dalam Angka BPS Kabupaten Manggarai yang dirilis Tahun 2016, maka realisasi indikator kinerja ini adalah Rp.2.479.710,8 dari target Rp.2.472.374,19; dengan persentase capaian 100,30%.

Realisasi PDRB ADHK kabupaten Manggarai Tahun 2011-2015 seperti terlihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.3
PDRB ADHK
Tahun 2011-2015



Berdasarkan grafik 3.3 di atas, PRDB ADHK Kabupaten Manggarai tahun 2011 -2015 mengalami peningkatan.

4. Indikator PDRB Perkapita ADHB

Pendapatan perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin baik tingkat perekonomian daerah, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meski masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sekurang-kurangnya sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestic dalam bentuk barang dan jasa. Target PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2016 adalah Rp. 9.810.442 dan terealisasi sebesar Rp. 10.470.000 (angka sementara yang bersumber dari BPS Kabupaten Manggarai) dengan capaian sebesar 106,72% atau kategori **MEMUASKAN**.

Capaian tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 5.704.177 atau 88,85% dari target 6.420.307.

5. Indikator Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan, yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Kemiskinan dapat terjadi karena keterbatasan faktor-faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi) dan terbatasnya sarana dan prasarana, ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahan dan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan system teknologi untuk berproduksi) dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya.

Kemiskinan harus memenuhi 14 kriteria sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan rumah tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal dari bambu/rumbai/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas bangunan tempat buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan buruh bangunan, buruh bangunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan harga minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sesuai Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2016, persentase penduduk miskin sebesar 23,15% dari target 19,73%. Dengan demikian total penduduk miskin Kabupaten Manggarai Tahun 2016 adalah sebesar 79.673 jiwa dari total penduduk 344.159. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin dengan nominal 72 jiwa dari total penduduk miskin sebesar 79.745 jiwa di Tahun 2015 (Total Penduduk 2015 adalah 338.324, dan % penduduk miskin 21,52%).

Pemerintah Kabupaten Manggarai pada periode RPJMD 2016-2021 sangat serius untuk menangani penduduk/KK miskin agar dari tahun ke tahun berkurang. Keseriusan itu ditunjukkan dengan adanya agenda-agenda kerja antara lain:

- 1) BERKANTOR DI DESA

Berkantor di desa dilakukan setiap akhir pekan minimal sekali dalam sebulan. Agenda ini mulai dilaksanakan pada Bulan Juni 2016 dengan tujuan.

- Melakukan verifikasi factual terhadap orang miskin yang mendapat bantuan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (KPKN);
- Memastikan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab/desa adalah tepat sasaran (tepat orang miskin dan tepat outcome);
- Menyusun perencanaan program dan kegiatan terhadap KK miskin yang terabaikan .

- 2) Penataan Kelembagaan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah membentuk sebuah Dinas baru yakni **Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Penataan Ruang dan Pertanahan**. Dinas ini diberi tugas khusus untuk orang-orang miskin. Mulai TA. 2017, Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan pembangunan 1.000 rumah bagi KK Miskin setiap tahun dalam periode lima tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai berusaha menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera (*Kěté api oné, téla galang pé'ang*).

Berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai dari tahun 2011-2016, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai
Tahun 2011-2016

Tahun	Persentase	Jumlah Penduduk (Orang)	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2011	21,39	302.781	64.765
2012	21,52	323.897	69.703
2013	21,52	332.560	71.567
2014	21,52	337.286	72.584
2015	21,52	338.324	79.745
2016	23,15	344.159	79.673

Ket.
- Jumlah Penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Persentase Penduduk Miskin berdasarkan data BPS Kabupaten Manggarai

Grafik 3. 4
Persentase Penduduk Miskin



6. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

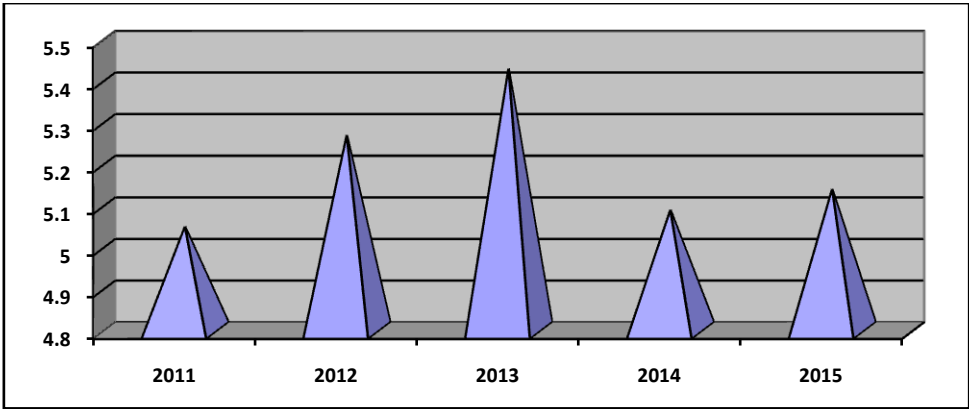
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan

menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Salah satu agenda prioritas RPJMD 2016-2021 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Manggarai. Sasaran ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan pembangunan.

Sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2016, LPE Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2016 adalah 5,14% dari target 5,2% atau 98,85% bermakna *MEMUASKAN*. LPE ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan LPE tahun 2015 sebesar 5,09%.

Grafik 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Manggarai
Tahun 2011-2015



7. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar

Pengembangan tanaman pokok seperti padi dan jagung lebih diarahkan untuk memenuhi keperluan konsumsi rumah tangga disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun nasional. Indikator produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencakup Padi, Padi Gogo, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyebutkan bahwa dari 20.535 Ha luas lahan panen padi yang dikelola masyarakat, jumlah produksi tahun 2016 adalah 106.451 ton. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 101.287 ton. Atau dengan kata lain produktivitas tahun 2016 adalah 5,18 Ton/Ha dari target 4,71

Ton/Ha dengan tingkat capaian 110,06%. Sedangkan produktivitas bahan pangan lokal lainnya adalah sebesar 20,34 Ton/Ha.

Peningkatan produksi dan produktivitas ini disebabkan karena:

- Adanya percetakan sawah baru
- Pembangunan jaringan irigasi
- Penggunaan benih unggul berlabel dan
- Penerapan budi daya padi pusat seluas 5.000 Ha

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi ke depan adalah :

- Menanam komoditi yang tahan terhadap kekeirngan
- Mengintensifkan pengamatan pembasmian/pengendalian terhadap hama/penyakit
- Menggunakan benih berlabel
- Meningkatkan/memberikan sosialisasi kepada masyarakat/petani

Perkembangan produktivitas komoditi tanaman pangan kondisi 4 (empat) tahun terakhir dapat dibaca pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan
Tahun 2011-2016

No.	Jenis Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)					
		Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
1.	Padi	5,02	5,03	5,04	5,02	5,01	5,18
2.	Padi Gogo	1,94	1,83	2,11	2,10	2,18	2,19
3.	Jagung	3,18	2,62	2,61	2,37	2,82	2,83
4.	Kedelai	0,22	1,31	0,96	1,19	1,20	1,22
5.	Kacang Tanah	0,51	1,14	1,05	1,02	1,01	1,03
6.	Kacang Hijau	0,55	1,14	1,15	1,35	1,13	1,16
7.	Ubi Kayu	7,18	8,05	8,05	0,06	8,03	8,05
8.	Ubi Jalar	3,29	3,94	3,91	3,92	3,85	3,86



8. Indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Berdasarkan data dan proyeksi BPS Provinsi NTT, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi Kabupaten Manggarai maupun provinsi NTT. Dengan menggunakan tahun dasar 2010, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi dengan kisaran 24,03% terhadap total PDRB menurut lapangan usaha. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten adalah mengintensifkan produksi pertanian di Kabupaten Manggarai maupun kabupaten lainnya yang berpotensi (secara iklim dan geografis) untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 peranan sektor ini mencapai 27,01% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 26,14% dan pada tahun 2013 peranan sektor ini kembali menurun menjadi 25,52%. Pada tahun 2014, kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 24,58% dan tahun 2015 yang dirilis tahun 2016, sebesar 24,03 dengan persentase capaian 93,36% berpredikat **MEMUASKAN** (*data masih bersifat sangat sementara*).

9. Indikator Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) ini tidak dapat dihitung karena sistem perhitungan PDRB tahun 2016 ini dihitung per sektor bukan per komoditi.

10. Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sarana perdagangan meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan; toko swalayan; Gudang; Bengkel-bengkel kendaraan. Data BPS Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan menempati urutan kelima terhadap PDRB Kabupaten Manggarai. Besaran kontribusi dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan. Tahun 2011 : Rp. 184.875,3 atau 8,63%, Tahun 2012 : 210.104,3 atau 8,70%, Tahun 2013 : 232.966,8 atau 8,67%, Tahun 2014 : Rp.263.894,2 atau 8,79% dan Tahun 2015 sebesar Rp. 294.249,3 atau 8,79% dengan tingkat capaian 98,21% dari target 8,95%.

Grafik 3.6
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2011-2015



11. Indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Sedangkan Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri.

Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai menurut lapangan usaha memeringkatkan kontribusi lapangan usaha bidang Industri Pengolahan menempati urutan ke-14 dari 17 bidang lapangan usaha. Besaran kontribusi bidang ini sebesar Rp. 12.454,8 di Tahun 2016 dengan persentase sebesar 0,37% dari target 0,5% dan tingkat capaian sebesar 74%(capaiannya tahun 2015).

12. Indikator Persentase Pertumbuhan Industri

Berdasarkan jumlah pekerja, industri pengolahan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih;
- b. Industri Sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang;
- c. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 5-19 orang; dan
- d. Industri Kerajinan Rumah Tangga adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang.

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2016, jumlah industri kecil baik formal maupun informal Kabupaten Manggarai sampai tahun 2015 sebanyak 2.317 unit dengan persentase pertumbuhan mencapai 0,04% dari jumlah industri tahun 2014 sebanyak 2.234 unit. Realisasi pertumbuhan 0,04% ini tidak mencapai target yang telah diperjanjikan yaitu 0,2% dengan persentase capaian kinerja 17,91% dengan kategori **SANGAT KURANG**.

13. Indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk adalah pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan atau penghasilan maka porsi pengeluaran akan mulai bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan untuk makanan. Demikian juga sebaliknya apabila pendapatan atau penghasilan rumahtangga menengah ke bawah maka porsi pengeluaran yang diutamakan pada pemenuhan kebutuhan akan makanan.

Perubahan pola konsumsi tersebut terjadi karena adanya penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang memaksa mereka yang berpendapatan rendah akan melakukan tindakan dengan memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan. Pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Manggarai ditargetkan sebesar Rp.1.968.323,- dan terealisasi sebesar Rp.687.507 dengan capaian kinerja 34,93% atau kategori **SANGAT KURANG**.

- Hal ini disebabkan karenatingginya target yang ditetapkan dan sensus ekonomi dilaksanakan pada tahun 2013 dan belum dilakukan update data;

Realisasi Tahun 2016 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI THN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
PDRB Kabupaten Manggarai (ADHB)	Rp. 3.347.462,90	4.069.904	82,25
Pertumbuhan PDRB ADHK	5,14	5,29	97,16
PDRB ADHK	2.479.710,80	2.699.244,58	91,87
PDRB perkapita ADHB	10.470.000	11.115.043	91,87
Persentase penduduk miskin	23,15%	14,93%	44,94
Pertumbuhan Ekonomi	5,14%	5,29%	94,20
Produktivitas Padi atau bahan pangan utama Lokal lainnya per hektar	5,18	5,43	95,40
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB ADHB (Dalam Juta Rupiah)	24,03	26,27	91,47
Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0	1,97	
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,33	9,2	79,67
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0,37	0,9	41,11
Persentase pertumbuhan industry	0,36	0,6	60%
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	687.507	2.051.044	33,52%
RATA-RATA			62,38
KATEGORI			CUKUP BAIK

2. Capaian Sasaran 2 : MENINGKATNYA JUMLAH PAD

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. PAD tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. PAD juga

berfungsi guna memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap keuangan/dana dari pemerintah pusat (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni perspektif kesatuan perekonomian nasional dan tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu program peningkatan PAD merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus setiap tahun. Sasaran *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)* akan ditakar oleh 2 (dua) indikator sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

SASARAN 2

MENINGKATNYA JUMLAH PAD

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah PAD (dalam jutaan)	Rp. 82	78	95,12
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	5	2	40
RATA-RATA			67,56
KATEGORI			BAIK

a. Indikator Jumlah PAD

Indikator ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari target Rp. 82 (dalam jutaan), realisasinya adalah Rp. 78 (dalam jutaan) dengan tingkat capaian sebesar 95,12% berkategori MEMUASKAN. Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.176.016.863, capaian ini meningkat dari capaian tahun 2015.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- 4. Mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 5. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai selama tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan PAD Kabupaten Manggarai
Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Total PAD (Rp.)	% Peningkatan
1.	2012	38.198.316.421,25	
2.	2013	46.866.790.827,00	22,69
3.	2014	64.487.636.691,26	37,60
4.	2015	75.009.754.682,33	16,32
5.	2016	78.666.551.243,33	4,88

Grafik 3.7
PAD Kabupaten Manggarai
Tahun 2012-2016



b. Indikator Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan instrumen Kebijakan Daerah yang sifatnya formal. Sebagai kebijakan daerah, Perda yang mendukung iklim usaha akan menentukan ada tidaknya insentif maupun disinsentif terhadap aktivitas perekonomian. Kebijakan ini diharapkan memicu adanya peningkatan investasi yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi dari indikator ini adalah dua perda dari target lima perda dengan tingkat capaian 40% . Kedua Perda tersebut adalah (1) Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan (2) Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, maka:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI Tahun 2016	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)
Jumlah PAD (dalam jutaan)	Rp. 78	126	61,90
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	5	40,00
RATA-RATA			81,90
KATEGORI			SANGAT BAIK

3. Capaian Sasaran 3 MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

Perikanan merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Perhatian itu bermaksud agar ada peningkatan produksi perikanan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat Manggarai.

Dengan predikat Memuaskan (129,38%), Untuk mencapai / mewujudkan sasaran ini disediakan beberapa program yakni Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan serta Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Untuk melaksanakan program tersebut disediakan anggaran sebesar Rp.6.468.176.700,- dan yang terserap/terrealisasi sebesar Rp.5.586.935.548,- atau setara dengan 86,38%.

Hal-hal yang mendorong meningkatnya produksi perikanan tahun 2016 :

- Meningkatkan jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan;

- Meningkatnya jumlah kelompok binaan perikanan;
- Tersedianya sarana penunjang pemasaran hasil perikanan;

Capaian Sasaran ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

SASARAN 3

MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Produksi perikanan	6.000 Ton	6.756,49 Ton	112,61
Produksi perikanan budidaya :	137 Ton	118,40	86,42
Air Tawar	115 Ton	108,25 Ton	94,13
Air Payau	22 Ton	10,15 Ton	46,14
Produksi rumput laut	13 Ton	34,40 Ton	264,62
RATA-RATA			154,55
KATEGORI			MEMUASKAN

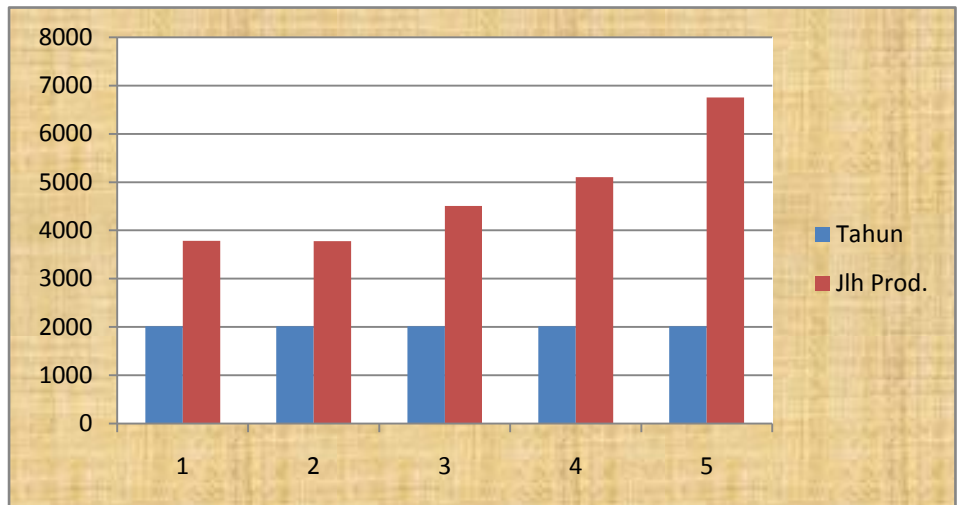
1. Indikator Produksi Perikanan Tangkap

Pembangunan perikanan diarahkan pada peningkatan usaha melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi laut yang didukung oleh pemanfaatan IPTEK. Pengembangan perikanan tangkap dapat meningkatkan produksi ikan, konsumsi hasil-hasil ikan, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan petani nelayan. Perkembangan produksi tangkap ikan segar terus meningkat yaitu 6.756,49 Ton atau 112,61% dari target 6.000 Ton. Jumlah produksi ini meningkat sebesar 1.653,2 ton dari tahun 2015 yang berjumlah 5.103,29 ton.

Tabel 3.5
Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Jlh Produksi (Ton)
1.	2012	3.781,26
2.	2013	3.781,10
3.	2014	4.509
4.	2015	5.103,29
5.	2016	6.756,49

Grafik 3.8
 Produksi Perikanan Tangkap
 Tahun 2012-2016



Kenaikan ini didukung oleh adanya penambahan sarana penunjang kegiatan penangkapan ikan melalui bantuan alat tangkap baik mesin maupun jaring dari Pemerintah Daerah. Juga didukung oleh semakin meningkatnya kelompok binaan sebanyak 129 kelompok sampai dengan Tahun 2016.

Hal-hal yang mendorong meningkatnya produksi perikanan tahun 2016:

- Bertambahnya jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap.
- Bertambahnya Jumlah Bantuan baik alat tangkap maupun armada penangkapan.
- Terlaksananya pembinaan kelompok secara rutin.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi ke depan:

- Peningkatan jumlah bantuan secara terus menerus.
- Pelatihan dan sosialisasi tentang peraturan daerah.
- Meningkatnya pengawasan sumberdaya ikan.
- Menambah jumlah kelompok binaan perikanan.

2. Indikator Produksi Perikanan Budidaya

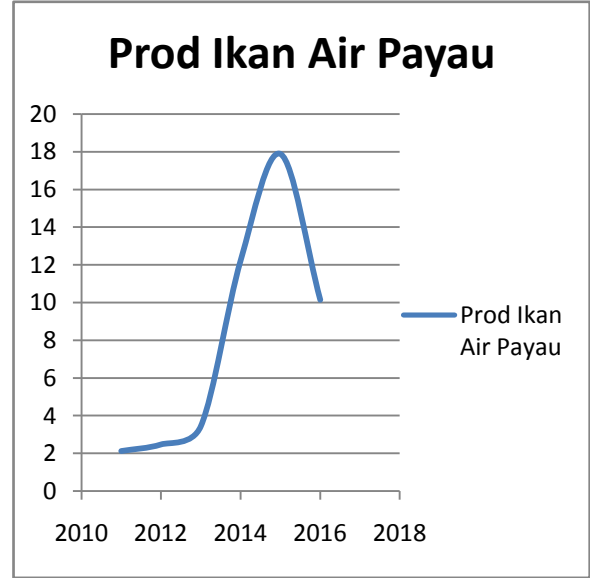
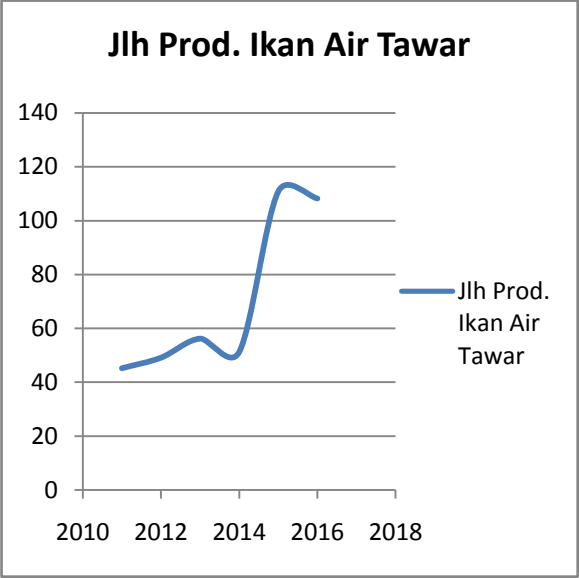
Sesuai data dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai, realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 sebanyak 118,40 ton atau 86,42% dari yang ditargetkan 137 ton. Produksi sebanyak 118,40 ton tersebut terdiri dari produksi perikanan air tawar sebesar 108,25 ton dan produksi perikanan air payau sebesar 10,15 ton. Sementara pada tahun 2015 produksi perikanan budidaya mencapai 128,73 ton yang terdiri dari perikanan budidaya air tawar sebesar 110,84 ton dan perikanan budidaya air payau sebesar 17,89 ton dengan tingkat capaian 171,21%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan produksi perikanan budidaya baik budidaya air tawar maupun air payau dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Produksi Perikanan Budidaya
Tahun 2011 s/d 2016

No.	Tahun	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		Jumlah (Ton)
		Air Tawar	Air Payau	
1.	2011	45,23	2,13	47,36
2.	2012	49,14	2,48	51,62
3.	2013	56,22	3,45	59,67
4.	2014	51,24	12,24	63,48
5.	2015	110,84	17,89	128,73
6.	2016	108,25	10,15	118,40

Kenaikan ini didukung oleh adanya penambahan sarana penunjang kegiatan budidaya perikanan melalui kegiatan bantuan benih ikan, penyuluhan perikanan dan pelatihan tentang pembuatan pakan ikan bahkan mulai tahun 2015 sampai dengan 2016 diberi bantuan pembangunan kolam rakyat semi permanen sebanyak 4 unit.





Hal-hal yang mendorong meningkatnya produksi tahun 2016 :

- Bertambahnya jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya.
- Bertambahnya Jumlah Bantuan baik berupa benih ikan, pakan maupun kolam rakyat semi permanen.
- Terlaksananya pembinaan kelompok secara rutin.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi ke depan :

- Peningkatan jumlah bantuan baik benih,pakan maupun kolam rakyat secara kontinyu.
- Pelatihan dan sosialisasi tentang peraturan daerah.
- Meningkatnya pembinaan kelompok dan pelatihan budidaya ikan.
- Menambah jumlah kelompok binaan perikanan budidaya.

3. Indikator Produksi Rumput Laut

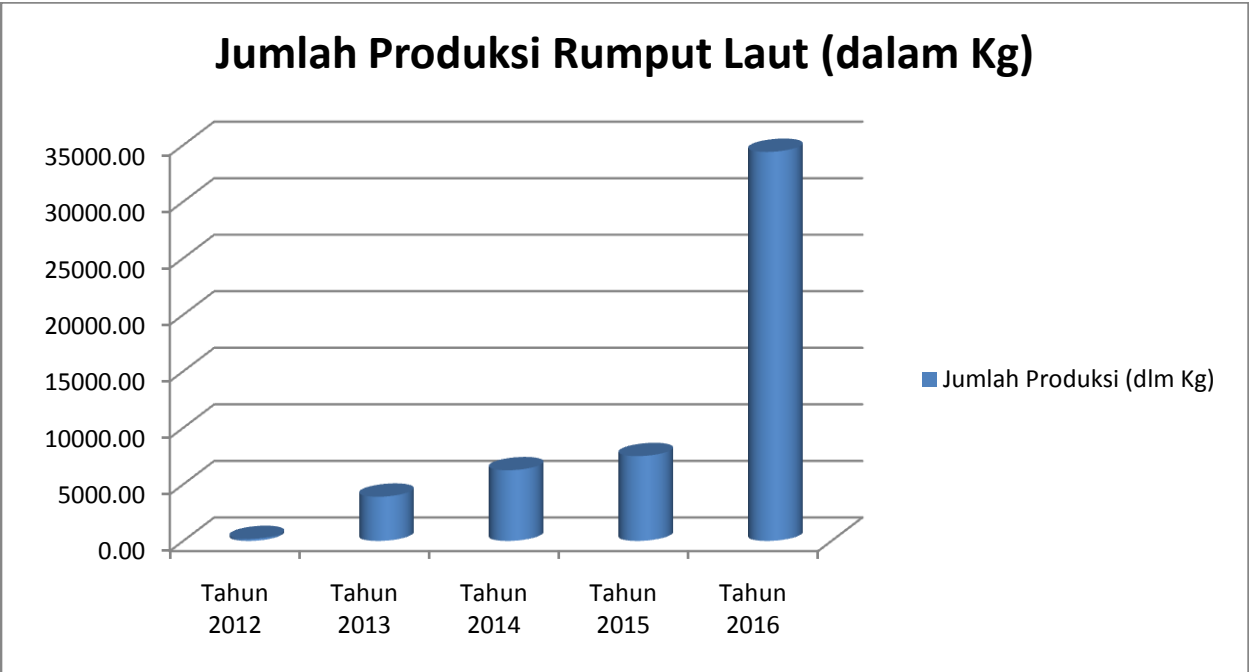
Pembudidaya rumput laut telah ada di Kabupaten Manggarai sejak tahun 2008 tepatnya di desa Robek Kecamatan Reok yang terdiri dari 2 kelompok budidaya dengan luas areal potensi pengembangan seluas 580 Ha. Pada tahun 2012 hasil panen rumput laut sebanyak 172,60 kg, tahun 2013 naik menjadi 3,9 ton atau naik sekitar \pm 300%. Pada tahun 2014 produksi rumput laut Kabupaten Manggarai mencapai 6,25 ton dengan tingkat capaian 110,82% dari target 5,64 ton. Pada tahun 2015 produksi rumput laut mengalami peningkatan yaitu 7,50 ton/7.500 Kg atau dengan capaian 122,75% dari yang ditargetkan 6,11 ton/6.115 Kg.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan dengan memberi bantuan kepada kelompok sehingga pada tahun 2016, produksi rumput laut mengalami peningkatan yang signifikan dengan hasil panen sebesar 34,4 ton dari target 13 ton dengan capaian sebesar 264,62% atau kategori **MEMUASKAN**.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 sebanyak 20 ton maka tingkat capaian mencapai 172%.

Tabel 3.7
Produksi Rumput Laut
Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Jlh Produksi Rumput Laut (Kg)
1.	2012	172,60
2.	2013	3.910
3.	2014	6.250
4.	2015	7.500
5.	2016	34.400



- Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi rumput laut ke depan:
- Penambahan Luas areal budidaya rumput laut.
 - Penambahan Jumlah pendukung kegiatan budidaya rumput laut.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaian indikator ini dapat dilihat dalam table berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI Tahun 2016	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)
Produksi perikanan	6.756,49	6.494,59	104,03
Produksi perikanan budidaya :	118,40 Ton	180	65,78
Air Tawar	108,25	135	80,19
Air Payau	10,15	45	22,56
Produksi rumput laut	34,40	20	172,00
RATA-RATA			113,94
KATEGORI			MEMUASKAN

4. **Capaian Sasaran 4**
MENINGKATNYA KEANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN ANGKA KECUKUPAN ENERGI AKTUAL

Pembangunan ketahanan pangan ditegaskan dalam undang-undang pangan Nomor 18 tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari **jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau**. Berkaitan dengan hal ini, diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama

dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dari segi fisiologis, manusia dapat hidup aktif dan sehat melalui zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan.

Upaya membangun diversifikasi konsumsi pangan di Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan. Pemerintah daerah menganjurkan masyarakat mengkonsumsi bahan pangan pokok selain beras dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor HK/01/2016 tanggal 07 Juni 2016. Instruksi itu mau menegaskan perlunya penganekaragaman jenis pangan dan peningkatan mutu gizi makanan rakyat baik secara kualitas maupun kuantitas. Penganekaragaman jenis pangan dan peningkatan mutu gizi makanan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai memiliki beberapa komoditas pangan, yang dapat dikembangkan sebagai komoditas pangan unggulan daerah. Diversifikasi produksi pangan ini bisa dilakukan melalui pengembangan pangan karbohidrat khas daerah seperti sorangum, talas, jali, jagung dan lain-lain.

Diversifikasi konsumsi pangan bukan hanya untuk mengubah selera dan kebiasaan makan. Melainkan memperluas pilihan masyarakat terhadap konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan. Diversifikasi juga mau menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh daya beli dan pengetahuan masyarakat, ketersediaan, dukungan kebijakan dan faktor sosial budaya lainnya.

Secara implisit, upaya diversifikasi konsumsi pangan dapat diidentikkan dengan upaya perbaikan gizi untuk mendapatkan kualitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Manggarai yang mampu berdaya saing. Karena itu, pokok kegiatan ini adalah berupa peningkatan pengetahuan, sosialisasi, dan promosi mengenai **pola pangan beragam, bergizi, dan berimbang**.

Kecukupan pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Kestabilan ketersediaan pangan dalam jangka panjang diukur dari ketersediaan protein per kapita per hari yang diperoleh dari perbandingan antara target capaian dengan ketersediaan protein per kapita per hari. Berdasarkan standard WNPG Nasional yaitu 63 gram/kap/hari, dengan capaian tingkat Kabupaten Manggarai yaitu 69,62 gram/kap/hari, sedangkan dari unsur energi, maka standard WNPG Nasional 2.400 kkal/kap/hari dengan capaian 2.964 kkal/kap/hari, dan unsur

lemak standard WNPG Nasional yaitu 65 gram/kap/hari namun capaiannya adalah 28,64 gram/kap/hari.

Selain itu cakupan ketersediaan pangan juga diukur melalui pola konsumsi masyarakat yang memenuhi kaidah **beragam bergizi seimbang dan aman (kaidah B2SA)**. Melalui indikator Pola Pangan Harapan dapat dibuat keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari 9 kelompok pangan utama (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta telur) baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Berdasarkan hasil analisis, PPH Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 berada pada skor 85,6 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 (85,2%) dari angka anjuran ideal 100, maka adanya peningkatan sebesar 0,4%.

Hasil di atas menunjukan bahwa pola konsumsi penduduk Manggarai masih didominasi oleh kelompok padi-padian, umbi-umbian buah/biji berminyak, sayur dan buah dibandingkan kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan dan gula. Skor tersebut menunjukan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Manggarai dikategorikan belum beragam dan berimbang.

Terhadap sasaran di atas diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 86% atau kategori **MEMUASKAN**. Sasaran 4 ini ditakar dengan menggunakan 5 indikator yakni:

SASARAN 4

MENINGKATNYA KEANEKARAGAMAN DIVERSIFIKASI KETERSEDIAAN DAN KONSUMSI PANGAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Ketersediaan pangan utama	85,96%	100	100
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	25,74%	24,03	93,37
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	75%	100	100
Pengutan Cadangan Pangan	71%	71	100
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,4%	85,6	99,65
RATA-RATA			98,60
KATEGORI			MEMUASKAN

a. Indikator Ketersediaan Pangan Utama

Tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang berfokus pada penyediaan pangan rumah tangga pada tingkat yang cukup, merata dan terjangkau serta aspek perbaikan pola konsumsi dalam rangka pemenuhan asupan gizi.

Kondisi ketahanan pangan masyarakat Manggarai dari aspek ketersediaan pangan relatif cukup aman. Namun masalah utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah perilaku konsumsi masyarakat yang mengutamakan beras sebagai makanan pokok (*belum dikatakan makan kalau belum makan nasi*). Hal ini berdampak pada orientasi penyediaan pangan dan pola penyediaan produksi pangan tingkat rumah tangga. Dari target 100% di tahun 2016, realisasinya adalah 100% dengan persentase tingkat capaian 100%, kategori MEMUASKAN. Kondisi ini dapat diartikan bahwa stok pangan Kabupaten Manggarai dalam kategori aman.

Hal-hal yang mendorong meningkatnya ketahanan pangan tahun 2016 :

- Meningkatnya produksi pertanian.
- Harga kebutuhan pokok masih relative stabil.
- Ketergantungan pada beras mulai berkurang.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan :

- Pendampingan terhadap petani atau kelompok tani terus dilakukan.
- Pendropingan saprodi tepat waktu.

2. Indikator Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Realisasi Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 24,04% dari target 25,74% atau persentase capaiannya 93,37% dengan kategori MEMUASKAN.

3. Indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Konsumsi pangan masyarakat kabupaten Manggarai mengacu pada dua aspek yakni aspek konsumsi energi (KKal/Kapita/Hari). Berdasarkan hasil survey tahun 2013 s/d 2016 pada 3 (tiga) wilayah (Daerah Pegunungan, Dataran Rendah dan Daerah Pantai) didapatkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi masyarakat Manggarai melampaui tingkat konsumsi ideal sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Konsumsi Energi Rumah Tangga Kkal/Kapita/Hari
Tahun 2013-2016

No	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Survey Pola konsumsi kalori perhari dari 9 bahan pangan utama/jumlah penduduk				Rata-rata	Target
		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok bahan pangan :	1.979,63	2.287,9	2.589,2	2.216	2.268,18	2.000
	- Padi-padian	1.540,04	1.634,2	1.603,3	1.439,0	1.554,14	1.000
	- Umbi-umbian	94,54	108,8	404,4	116,0	180,94	120
	- Pangan hewani	86,75	115,1	201,6	188,0	147,86	240
	- Minyak Lemak	89,6	113,6	181,9	197,0	145,53	200
	- Buah/Biji Berminyak	33,9	37,3	16,2	7,0	23,60	60
	- Kacang-kacangan	3,88	28,8	13,3	47,0	23,25	100
	- Gula	33,7	52,7	58,6	94,0	59,75	100
	- Sayur dan Buah	80,72	125,6	98,7	107,0	103,01	120
	- Bumbu-bumbuan dan minuman	16,5	71,8	11,2	22,0	30,38	60

Tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata kontribusi energi dari padi-padian pada tahun 2013-2016 sebesar 1.554,14 kkal/kapita/hari melebihi komposisi energi harapan sebesar 1.000 kkal/kapita/hari; umbi-umbian sebesar 180,94 kkal/kapita/hari melebihi dari angka ideal sebesar 120 kkal/kapita/hari; pangan hewani sebesar 147,86 kkal/kapita/hari kurang dari angka ideal sebesar 240 kkal/kapita/hari; minyak lemak sebesar 145,53 kurang dari angka ideal sebesar 200 kkal/kapita/hari; buah/biji berminyak sebesar 23,60 kkal/kapita/hari kurang dari angka ideal sebesar 60 kkal/kapita/hari; kacang-kacangan sebesar 23,25 kkal/kapita/hari kurang dari angka ideal sebesar 100 kkal/kapita/hari; gula sebesar 59,75 kkal/kapita/hari kurang dari angka ideal sebesar 100 kkal/kapita/hari; sayur dan buah sebesar 103,01 kkal/kapita/hari kurang dari angka ideal sebesar 120 kkal/kapita/hari; dan bumbu-bumbuhan dan minuman sebesar 30,38 kkal/kapita/hari kurang dari angka ideal sebesar 60 kkal/kapita/hari.

4. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan masyarakat Kabupaten Manggarai sampai dengan keadaan Desember 2016 adalah 3.485,60 ton. Jumlah tersebut mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sampai dengan akhir tahun. Cakupan

ketersediaan pangan di tahun 2016 adalah 71% dari target 71% dengan capaian kinerja sebesar 100% atau kategori **MEMUASKAN**. Apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 2015 yang mencapai 70,54% maka terjadi peningkatan produksi pangan utama dan pangan lokal yang mampu menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Manggarai. Pencapaian kecukupan pangan ini diperoleh melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan.

Pada tahun terakhir RPJMD, cakupan ketersediaan pangan ditargetkan sebesar 61,25% untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Manggarai dan mampu menjadi kabupaten yang memiliki ketahanan pangan yang baik dengan menggalakan program otonomi pangan guna menjamin tambahan ketersediaan pangan bagi penduduk Kabupaten Manggarai.

5. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan makanan yang mengandung zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) sehingga mampu beraktivitas secara lebih optimal dan produktif.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat dan diukur berdasarkan sumbangan energi dari 9 (Sembilan) kelompok pangan yang dikonsumsi. Skor PPH Kabupaten Manggarai dalam waktu 3 tahun terakhir adalah 69,67 pada tahun 2014, 82,4 tahun 2015 dan 84,6 tahun 2016. Angka ini menunjukkan keragaman konsumsi masyarakat masih belum sesuai dengan harapan yakni idealnya mencapai skor 100. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat lebih didominasi oleh kelompok padi-padian, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai standar ideal adalah kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan dan gula.

Sehubungan dengan itu kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan merupakan salah satu upaya pemerintah agar pola konsumsi masyarakat lebih beraneka ragam.

Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Manggarai melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan telah berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang tersebar pada 11 kecamatan dan 38 desa dengan sasaran kelompok wanita tani dengan sumber dana TP untuk 38 KWT dan dana DAU Kabupaten Manggarai untuk 26 KWT. Kegiatan ini diharapkan akan berlanjut terus sehingga membutuhkan dukungan dana untuk pengembangan dan sosialisasi.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaian keempat indikator di atas adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI Thn 2016	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)
Ketersediaan pangan utama	100	100	100,00
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	24,03	26,27	91,47
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	100	100	100,00
Pengutan Cadangan Pangan	71	75	94,67
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,6	87,80	97,49
RATA-RATA			96,73
KATEGORI			MEMUASKAN

5. Capaian Sasaran 5

MENINGKATNYA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN BAHARI PADA DESTINASI WISATA DI WILAYAH FLORES

Sasaran ini diarahkan dalam rangka pengembangan industri pariwisata melalui perbaikan infrastruktur kepariwisataan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai merupakan sektor unggulan dan berkontribusi terhadap PAD. Untuk capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 5

MENINGKATNYA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN BAHARI PADA DESTINASI WISATA DI WILAYAH FLORES

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Kunjungan wisata	100%	88,240%	88,24%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,79%	3,81%	482,28
RATA-RATA			285,26
KATEGORI			MEMUASKAN

a. Indikator Kunjungan Wisatawan

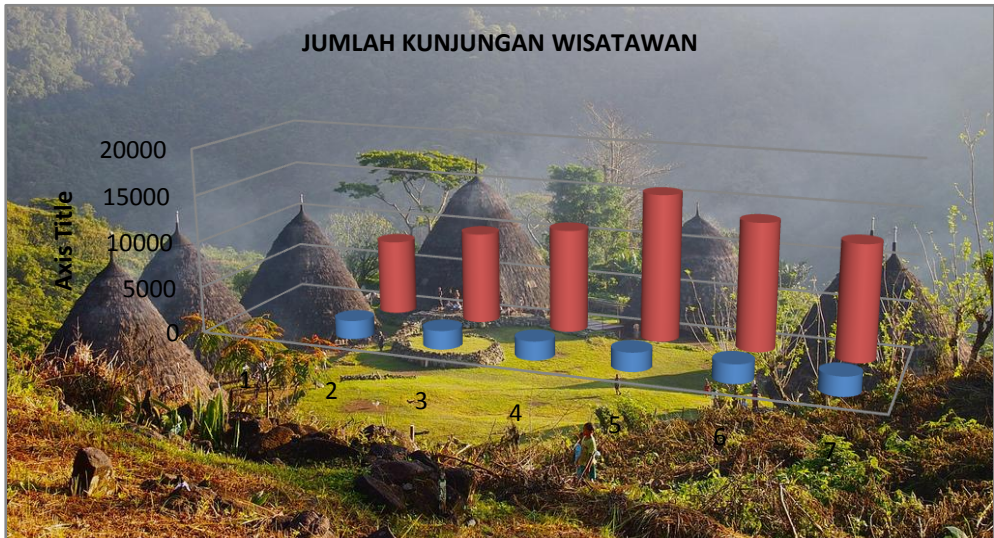
Dalam rangka mengoptimalkan Kabupaten Manggarai menjadi daerah tujuan wisata maka beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2016. Sesuai data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 12.354 orang dari target 14.000 orang dengan capaian kinerja sebesar 88,24% atau kategori MEMUASKAN. Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya meningkatkan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi daerah/tempat-tempat wisata di Kabupaten Manggarai melalui peningkatan daya tarik obyek wisata maupun melalui promosi-promosi ke media.

Dari tahun 2011-2014 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 s/d 2016, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Manggarai mengalami penurunan seperti yang terlihat dalam tabel. Berkurangnya kunjungan wisatawan tersebut kemungkinan disebabkan oleh aksebilitas menuju obyek wisata yang ada cukup sulit dan penataan obyek wisata yang kurang baik. Hal ini menjadi perhatian yang serius dari dinas terkait untuk ke depannya melakukan penataan tempat-tempat pariwisata serta aksebilitas menuju lokasi wisata terus ditingkatkan khususnya yang sudah dikenal dan sering dikunjungi wisatawan seperti Liang Bua, Kampung Ruteng, Niang Todo, Wae Rebo, Lodok di Cara, Inembele, Ulumbu dan lain-lain. Disamping itu potensi wisata lainnya seperti wisata budaya dan tarian tradisional Manggarai seperti caci serta pembangunan sarana dan prasarana wisata terus ditingkatkan.

Tabel 3.9
Data Kunjungan Wisatawan
Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Jumlah wisatawan
1.	2011	8.196
2.	2012	9.935
3.	2013	11.170
4.	2014	15.792
5.	2015	13.682
6.	2016	12.354

Grafik 3.9
Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Manggarai
Tahun 2011-2016



Hal-hal yang menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan tahun 2016 :

- Kurangnya promosi wisata ke media.
- Infrastruktur dari dan ke obyek wisata belum memadai.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan :

- Promosi-promosi semakin ditingkatkan.
- Peningkatan infrastruktur obyek wisata.

b. Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Data BPS Kabupaten Manggarai menyebutkan bahwa dari total PDRB Kabupaten Manggarai tahun 2016, kontribusi sektor pariwisata sebesar 3,81% dari target 0,79% dengan tingkat capaian 482,28% kategori MEMUASKAN.

Jika dibandingkan target RPJMD, maka capaian ke-2 indikator ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI THN. 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Kunjungan wisata	88,24	100	88,24
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,81	1,7	223,53
RATA-RATA	200,30		
KATEGORI	MEMUASKAN		

6. Capaian Sasaran 6

MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KENYAMANAN JALAN DAN JEMBATAN

Rata-rata capaian sasaran ini sebesar 131,92% kategori MEMUASKAN. Capaian ini didukung oleh tiga indikator seperti dalam table berikut:

SASARAN 6

MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KENYAMANAN JALAN DAN JEMBATAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan	0,5	0,83	166,58
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	58,34%	59,20	101,47
Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.203.437 Orang	2.814.342	127,73
RATA-RATA			131,92
KATEGORI			MEMUASKAN

a. Indikator Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Sampai dengan tahun 2016, Panjang jalan di Kabupaten Manggarai 1.902,34 Km dengan rincian jalan kabupaten 1.700,90 Km, jalan provinsi 34,50 Km dan jalan negara 166,94 Km. Sementara kendaraan berjumlah 2.284 unit. Dengan demikian rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 adalah 0,83 Km/Unit atau 166,58% dari yang ditargetkan dengan kategori MEMUASKAN.

Hal-hal yang mendorong meningkatnya capaian tahun 2016 :

- Tersedianya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Sebagai akibat lanjutnya adalah tingginya permintaan kendaraan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan :

- Maintenance infrastruktur
- Ketersediaan anggaran bidang cipta karya

b. Indikator Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Jalan dalam kondisi baik didefinisikan sebagai kondisi jalan yang bisa dan layak dilewati oleh kendaraan. Persentase panjang jalan berkondisi baik dan

sedang terhadap total panjang jalan pada setiap status jalan dalam suatu wilayah, kewenangan penanganannya sesuai status jalan. Sedangkan jalan tidak baik didefinisikan adalah persentase panjang jalan berkondisi rusak terhadap total panjang jalan pada setiap status jalan dalam suatu wilayah kewenangan penanganan jalan yang dievaluasi pada tiap akhir tahun.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didefinisikan sebagai tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan, yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, menjamin kendaraan dapat berjalan dengan nyaman dan selamat serta menjamin agar perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan yang telah direncanakan.

Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, total Panjang jalan Kabupaten Manggarai 1.700,90 km, dalam kondisi baik dan sedang sampai dengan tahun 2015 sepanjang 962,04 Km dan yang dikerjakan tahun 2016 sepanjang 44,83 Km.

Dengan demikian dalam kurun waktu 2015-2016, pemerintah Kabupaten Manggarai telah menyediakan jalan dalam kondisi baik bagi pengguna jalan sepanjang 1.006,87 Km) atau 59,20% dari target 58,34% dengan persentase capaian 101,47%.

Kondisi ketersediaan jalan kabupaten ini akan terus diupayakan untuk memenuhi target RPJMD pada tahun 2021 yaitu sepanjang 147,49 km. Pemerintah Kabupaten Manggarai akan terus memberikan perhatian yang serius untuk mengerjakan jalan kabupaten agar dalam kondisi baik sampai akhir periode RPJMD.

Penetapan target ini telah sesuai dengan target yang diamanatkan dalam SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bahwa di akhir tahun perencanaan harus mencapai 100%, atau seluruh jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten harus dalam kondisi baik.

c. Indikator Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Kabupaten Manggarai memiliki potensi pengembangan, pertumbuhan dan investasi baru pada berbagai bidang pembangunan dan ekonomi yang cukup besar karena dapat memberikan kontribusi kepada daerah terutama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis layanan adalah layanan perhubungan. Dengan lancarnya transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Lancarnya transportasi serta meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan interaksi lalu lintas serta angkutan jalan dan tentu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Realisasi arus penumpang angkutan umum di Tahun 2016 adalah 2.814.342 orang dari target 2.203.437 dengan tingkat capaian 127,73%. Indikator ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.154.852.200.

Jika dibandingkan target RPJMD, maka capaian ke-3 indikator ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2016	Target RPJMD 2021	Capaian (%)
Ratio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan	0,5	0,70	71,43
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	59,20	67,55	87,64
Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.814.342	2.601.245	108,19
RATA			89,09
KATEGORI			MEMUASKAN

7. Capaian Sasaran 7
MENURUNNYA PREVALENSI KEKURANGAN GIZI (UNDERWEIGHT) PADA ANAK BALITA

Sasaran ini dimaksudkan untuk melihat kualitas kesehatan masyarakat Manggarai yang secara umum tercermin melalui beberapa indikator antara lain indikator status gizi balita dan Usia Harapan Hidup (UHH).

SASARAN 7
 MENURUNNYA PREVALENSI KEKURANGAN GIZI (UNDERWEIGHT) PADA ANAK BALITA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase balita gizi buruk yang tertangani	100%	100%	100
Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,99%	54,20%	83,40
Angka Usia Harapan Hidup	67,79 Tahun	64,78 Tahun	95,56
RATA-RATA			92,99
KATEGORI			MEMUASKAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran atas 3 (tiga) buah indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah 91,45% dengan kategori **MEMUASKAN**. Anggaran yang disiapkan untuk mencapai sasaranini berjumlah Rp. 1.542.217.050.

Analisis capaian sasaran *Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight)* pada Anak Balita tahun 2016 sebagai berikut :

a. **Indikator Persentase Balita Gizi Buruk yang Tertangani**

Status gizi buruk ataupun kurang gizi merupakan masalah yang kompleks karena penyebabnya multi faktor dan multi dimensi. Penyebab langsung gizi buruk adalah tidak cukupnya konsumsi energi, protein, zat gizi lain serta adanya penyakit infeksi yang menyertainya. Penyebab tidak langsung lainnya adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya keluarga, seperti pola asuh, daya beli keluarga, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan juga pengetahuan ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

Capaian kinerja dari indikator *Persentase Balita Gizi Buruk yang tertangani* pada tahun 2016 adalah 100%, dimana kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan/tertangani sebanyak 45 kasus atau meningkat 18 kasus dari tahun 2015 yang hanya 27 kasus dan tahun 2014 sebanyak 13 kasus.

b. **Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Sanitasi adalah perilaku untuk membudaya hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Berperilaku seperti ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan indikator

"prosentase rumah tinggal bersanitasi" diharapkan semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Manggarai dapat mengelola limbahnya dengan benar.

Untuk mendukung target daerah, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat dan pelatihan kader posyandu. Pencapaian terhadap indikator ini sebesar 96,01% atau kategori **MEMUASKAN** dari target 53,33% dan terealisasi sebesar 51,20%.

Pencapaian ini diperoleh dari Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.320.178.020,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.298.334.700,-atau setara 93,18%.

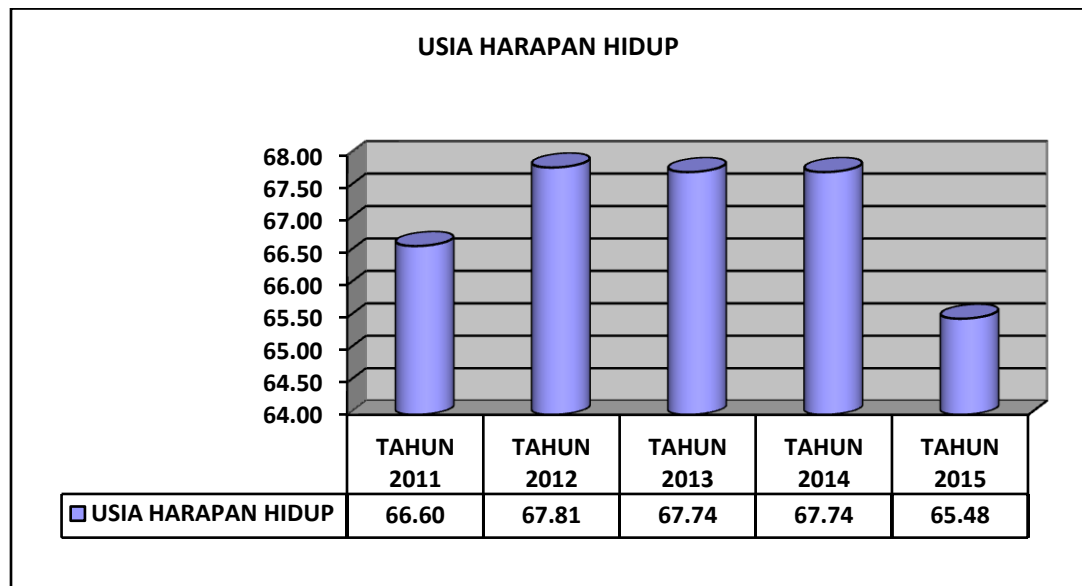
Hambatan bagi capaian sasaran / indikator ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan sasaran ke depan adalah Promosi dan sosialisasi dan Pelatihan kader posyandu.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Tidak ada UHH absolut yang bisa dijadikan patokan UHH ideal. Cara sederhana untuk menentukan UHH ideal adalah dengan melakukan perbandingan UHH antar wilayah dengan kemampuan sumber daya yang sama atau setara (benchmarking). Berdasarkan Data BPS Kabupaten Manggarai tahun 2015 yang dirilis pada tahun 2016, Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai adalah 65,48 tahun, berada dibawah UHH Provinsi NTT yang mencapai 65,91 tahun pada tahun yang sama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH di Kabupaten Manggarai antara lain disparitas status kesehatan, penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas lingkungan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.

Grafik 3.10
Usia Harapan Hidup (UHH)
Penduduk Kabupaten Manggarai Tahun 2011 s/d 2015



Sumber data : BPS Kab. Manggarai Tahun 2016

8. Capaian Sasaran 8

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN BAYI

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian yang terjadi pada bayi (usia 0 s/d <1 tahun) per 1.000 Kelahiran Hidup selama setahun.

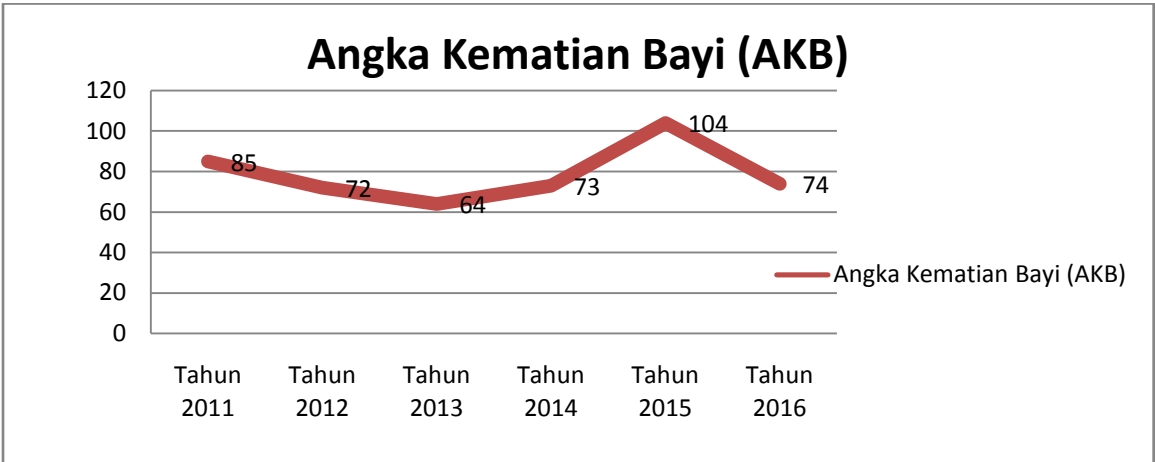
Sasaran 8 dan sasaran 9 menghabiskan anggaran Rp. 1.207.755.093 dengan capaian masing-masing sebagai berikut:

SASARAN 8

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN BAYI

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Angka kematian Bayi	16,13 /1000 KH	11,97%	125,79
RATA-RATA			125,79%
KATEGORI			MEMUASKAN

Grafik 3.11
Angka Kematian Bayi
Tahun 2011 s/d 2016



Sumber Data: Bidang Kesga Dinkes Kabupaten Manggarai Thn. 2016

Dari 6.182 total kelahiran hidup pada tahun 2016, kasus kematian bayi sebesar 74 kasus atau 11,97% per 1.000 KH dari target 16,13/1.000 KH dengan persentase capaian kinerja 125,79%. Capaian kinerja indikator ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan tingkat capaian 71,25% dengan 104 kasus.

Sebaran 74 kasus tersebut adalah sebagai berikut : Puskesmas Cancar sebanyak 8 kasus, Puskesmas Wae Mbeleng sebanyak 4 kasus, Puskesmas Nanu sebanyak 1 kasus, Puskesmas Wangko sebanyak 3 kasus, Puskesmas Ketang sebanyak 1 kasus, Puskesmas Watu Alo sebanyak 4 kasus, Puskesmas Bangka Kenda sebanyak 3 kasus, Puskesmas Timung sebanyak 4 kasus, Puskesmas Kota sebanyak 6 kasus, Puskesmas Lao sebanyak 2 kasus, Puskesmas Pagal sebanyak 6 kasus, Puskesmas Beamese sebanyak 4 kasus, Puskesmas Wae Codi sebanyak 7 kasus, Puskesmas Reo sebanyak 3 kasus, Puskesmas Waekajong sebanyak 1 kasus, Puskesmas Loce sebanyak 2 kasus, Puskesmas Iteng sebanyak 2 kasus, Puskesmas Ponggeok sebanyak 4 kasus, Puskesmas Narang sebanyak 2 kasus, Puskesmas Dintor sebanyak 5 kasus, Puskesmas Langke Majok sebanyak 2 kasus.

Kematian Bayi disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 7 orang, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) + KMK 3 orang, Asphixia (Kesulitan bernapas pada saat bayi lahir) 19 orang, Pneumonia 11 orang, Infeksi 9 orang, kelainan

kongenital 5 orang, masalah Laktasi 5 orang, Aspirasi Air Ketuban 3 orang, Dehidrasi 2 orang, SNAD 4 orang, Diare 1 orang, masalah lain-lain 5 orang.

Penyebab masih tingginya AKB di Kabupaten Manggarai adalah :

- ❖ Kondisi kesehatan ibu pada masa hamil seperti hamil dengan 4 Terlalu: Terlalu muda (*usia di bawah 18 tahun*), Terlalu tua (*menikah usia di atas 35 tahun*), Terlalu sering melahirkan (*perbedaan usia antara anak sangat dekat < 2 tahun*) dan Terlalu banyak (*memiliki anak lebih dari 4 orang*), ibu hamil KEK dan Anemia.
- ❖ Keterbatasan peralatan / peralatan belum memadai untuk penatalaksanaan bayi asfiksia dan BBLR.

Solusi yang ditawarkan atas permasalahan di atas adalah :

- ❖ melakukan sosialisasi dan monitoring.
- ❖ melakukan pendampingan ibu hamil pada saat posyandu untuk memeriksakan diri ke tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk pencegahan dini.
- ❖ Meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan di tempat-tempat pelayanan.
- ❖ Memperluas jaringan penyediaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, bernuansa kesehatan ibu dan anak yang dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan Revolusi KIA.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Angka kematian Bayi	11,97 /1000 KH	12,93	85,13
RATA-RATA			85,13
KATEGORI			MEMUASKAN

9. Capaian Sasaran 9
MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU

Selain AKB, agenda lain yang menjadi prioritas di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang diharapkan juga turun dari tahun ke tahun. Dan Sasaran ini dimaksudkan untuk melihat AKI tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN 9

MENURUNNYA ANGKA KEMATIAN IBU

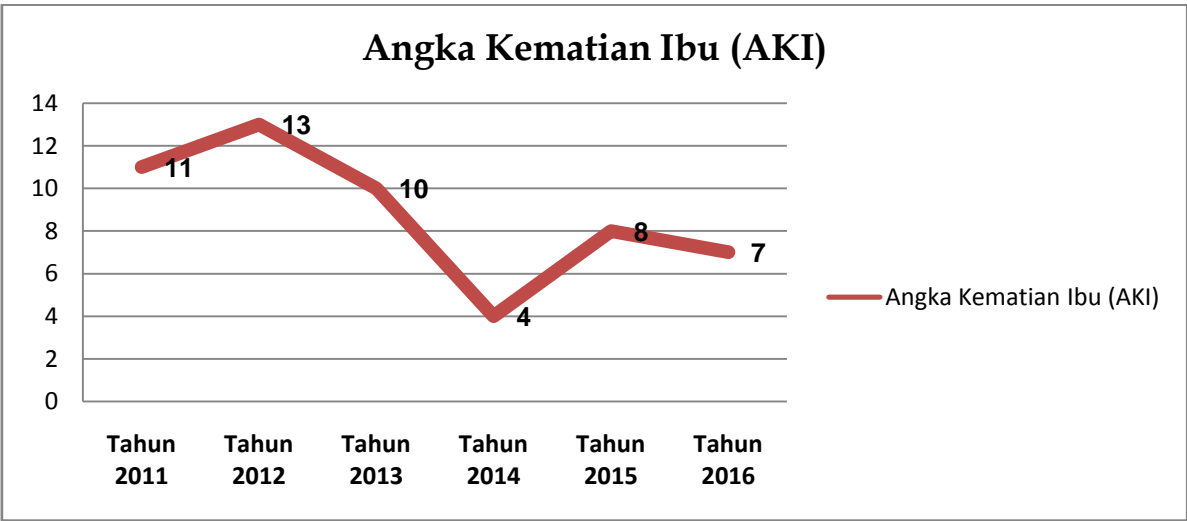
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Angka kematian Ibu	126,25 /100.000 KH	113,23	110,31
RATA-RATA			110,31
KATEGORI			MEMUASKAN

Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2016 adalah 113,23/100.000 KH dari target 126,25/100.000 KH dengan persentase capaian 110,31%. Sedangkan realisasi AKI tahun 2011-2016, dapat dibaca pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Angka Kematian Ibu
Tahun 2011-2016

No	Tahun	Jumlah KH	AKI	%
1	2011	6.055	11	181,66/100.000KH
2	2012	6.669	13	194,93/100.000 KH
3	2013	6.244	10	160,15/100.000 KH
4	2014	6.058	4	66,03/100.000 KH
5	2015	6.142	8	130,25/100.000 KH
6	2016	6.182	7	113,23/100.000 KH

Grafik 3.12
Angka Kematian Ibu
Tahun 2011 s/d 2016



Sumber Data: Bidang Kesga Dinkes Kabupaten Manggarai thn. 2016

Sebaran tujuh kasus di Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Reok sebanyak 1 kasus (Suspek Ruptur Uteri)

- b. Puskesmas Wae Codi sebanyak 2 kasus (Hepatitis dan Perdarahan)
- c. Puskesmas Timung sebanyak 1 kasus (Perdarahan Post Partum)
- d. Puskesmas Nanu sebanyak 1 kasus (Perdarahan-Retensio Plasenta)
- e. Puskesmas Cancar sebanyak 1 kasus (Perdarahan)
- f. Puskesmas Ketang sebanyak 1 kasus (Perdarahan)

Penyebab terjadinya kasus AKI di tahun 2016 adalah :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat (keluarga ibu hamil) untuk melahirkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan ataupun ditolong oleh tenaga kesehatan maupun tenaga terlatih lainnya.
- b. Adanya penyakit bawaan.

Langkah-langkah antisipatif untuk menekan AKI maupun AKB ke depan adalah melalui

- a. Melakukan sosialisasi dan monitoring.
- b. Melakukan pendampingan ibu hamil pada saat posyandu untuk memeriksakan diri ke tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk pencegahan dini.
- c. Pendidikan dan pelatihan maupun peran serta masyarakat dan keluarga dalam mendukung persalinan selamat, menyiapkan rumah tunggu ibu-ibu yang beresiko serta tetap melakukan kerjasama dengan NGO, AUSAID AIPMNH dalam memfasilitasi *Sister Hospital* untuk mendukung penurunan AKI dan AKB secara umum di Kabupaten Manggarai.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Angka kematian Ibu	113,23	110,25	97,30
RATA-RATA			97,30
KATEGORI			MEMUASKAN

10. **Capaian Sasaran 10**
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran (Triatmojo, 2006).

Rumah Sakit adalah sebagai tempat untuk melayani manusia (pasien) baik yang sedang sakit maupun yang sehat dengan menggunakan alat/ teknologi canggih sesuai dengan kebutuhan pasien, serta dilayani oleh sekelompok manusia (SDM/ karyawan).

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai sebagai rumah sakit rujukan dengan Kelas Type C, melakukan survey secara mandiri untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN 10

MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase tingkat kepuasan pelanggan	80%	75%	93,80
RATA-RATA			93,80
KATEGORI			MEMUASKAN

Realisasi dari indikator di atas adalah sebesar 75% dari target 80% dengan tingkat capaian 93,8% berkategori MEMUASKAN. Realisasi ini dihitung berdasarkan survey yang dilakukan secara mandiri oleh BLUD RSUD dr. Ben Mboi selama tahun 2016.

Hal-hal yang mendorong meningkatnya pelayanan tahun 2016:

- Status RSUD sebagai BLUD.
- Tingkat SDM semakin baik .
- Adanya dokter PPDs dari RSU Ciptomangunkusumo (*Program Sister Hospital*).
- Ketersediaan alat pemeriksaan penunjang semakin bertambah (CTG, USG).

- Tingkat ketertiban pengunjung semakin baik.

Hambatan :

- Petugas kesehatan yang kurang ramah.
- Pelayanan yang tidak tepat waktu.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan ke depan :

- Perlu dibangun Budaya Kerja yang ramah dan sopan bagi petugas pelayanan.
- Peningkatan disiplin bagi pegawai/petugas.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Persentase tingkat kepuasan pelanggan	75,00	100	75,00
RATA-RATA			75,00
KATEGORI			SANGAT BAIK

11. **Capaian Sasaran 11**
MENURUNNYA TFR (TOTAL FERTILITY RATE)

TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

SASARAN 11
 MENURUNNYA TFR

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,35%	3,15	106,35
RATA-RATA			106,35
KATEGORI			MEMUASKAN

Realisasi TFR di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 adalah 3,15% dari target 3,35% dengan tingkat capaian 106,35% berkategori MEMUASKAN. Nilai realisasi ini menggunakan angka proyeksi TFR dari BPS Kabupaten Manggarai.

Hal-hal yang mendorong meningkatnya capaian tahun 2016:

- Tingginya tingkat partisipasi KB.
- Aksesibilitas alokon KB yang semakin mudah.
- Peran Pemerintah cukup besar dalam mensosialisasikan program-programnya.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi ke depan:

- Meningkatkan peran PKB.
- Meningkatkan KIE.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,15	3,21	100,87
RATA-RATA			100,87
KATEGORI			MEMUASKAN

12. Capaian Sasaran 12

MENINGKATNYA CPR

Pelayanan KB merupakan upaya untuk mendukung kebijakan program KB nasional. Salah satu indikator program KB yaitu penggunaan KB saat ini dan CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*). CPR adalah persentase penggunaan alat/cara KB oleh pasangan usia subur (PUS) yaitu WUS (umur 15-49 tahun) berstatus menikah atau hidup bersama (Rajaguguk, Omas Bulan, 2010).

Penggunaan KB tahun 2013 bervariasi menurut provinsi, proporsi penggunaan KB saat ini terendah di Papua (19,8%) dan tertinggi di Lampung (70,5%), proporsi WUS kawin yang tidak pernah menggunakan KB tertinggi di Papua (68,7) dan terendah di Kalimantan Tengah (8,6%).

Pelaksanaan program keluarga berencana dinyatakan dengan pemakaian alat/cara KB saat ini. Pemakaian alat KB modern yang dinyatakan dengan CPR modern di antara WUS (wanita usia kawin 15-49 tahun) merupakan salah satu dari indikator universal akses kesehatan reproduksi. Hasil Riskesdas 2013,

pemakaian cara/alat KB di Indonesia sebesar 59,7 persen dan CPR modern sebesar 59,3 persen. Diantara penggunaan KB modern tersebut, sebagian besar menggunakan cara KB suntikan (34,3%), dan merupakan penyumbang terbesar pada kelompok non MKJP dan jenis hormonal. Pelayanan KB di Indonesia sebagian besar diberikan oleh bidan (76,6%) di fasilitas pelayanan swasta yaitu tempat praktek bidan (54,6%).

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi/CPR akan berpengaruh terhadap penurunan TFR. Peningkatan CPR didukung oleh tingkat pencapaian peserta KB aktif.

Salah satu ukuran dari kualitas pemakaian (CPR) adalah angka putus pakai kontrasepsi. Alasan putus pakai antara lain karena kegagalan kontrasepsi, ketidakpuasan terhadap alat/cara KB, efek samping dan tidak tersedianya alat/cara KB.

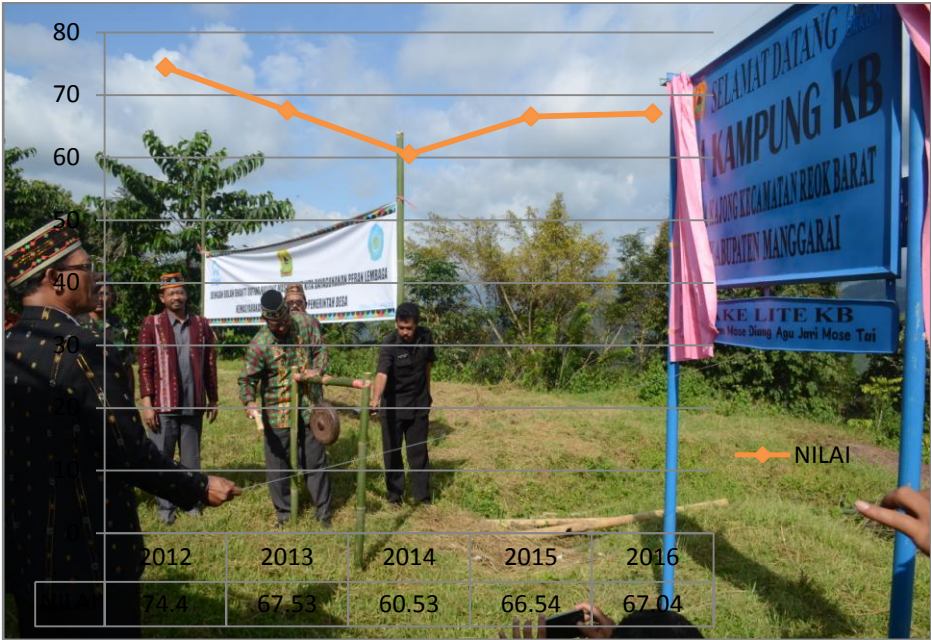
Akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi reversibel (bisa kembali subur) usia 15-45 tahun memiliki kemungkinan 1,8 untuk terjadi kegagalan kontrasepsi. Pada kontrasepsi tetap (kontap) yaitu sterilisasi, angka kegagalan hanyalah 1,3.

Program KB dilaksanakan untuk mencegah terjadinya dengan jarak terlalu rapat ataupun persalinan yang terlalu banyak pada seorang ibu yang dapat menimbulkan dalam kehamilan dan berimbas pada terjadinya kasus kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, Program KB yang merupakan program nasional yang diarahkan untuk mengatur pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur jarak dan jumlah persalinan penduduk.

SASARAN 12
MENINGKATNYA CPR

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	67,63%	67,04	99,13
RATA-RATA			99,13
KATEGORI			MEMUASKAN

Grafik 3.13
CPR
Tahun 2012-2016



Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 -35 tahun. PUS yang menjadi peserta KB aktif pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat, atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran strategis untuk meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi didukung oleh indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Akseptor KB. Sebagai upaya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Pemerintah Daerah selalu berupaya dengan arah dan kebijakannya antara lain :

1. Revitalisasi program KB melalui pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk secara bertahap, pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana.
2. Serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai serta akurat.

Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) serta pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Sesuai Data Badan KB dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manggarai, Jumlah PUS di Tahun 2016 adalah 50.174 pasang. Dari 50.174 total PUS tersebut, yang aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Manggarai adalah 33.636 atau 67,04%. Artinya setiap 100 PUS terdapat 67 pasang yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi. Realisasi CPR 67,04% ini didapat dari jumlah peserta KB Aktif sebesar 33.636 dibagi dengan total PUS 50.174 pasang. Tingkat capaian dari indikator sasaran ini adalah 99,1% atau bermakna **MEMUASKAN**.

Apabila tingkat CPR Kabupaten Manggarai dihubungkan dengan laju pertumbuhan penduduk maka realisasi CPR 67,04% juga memberikan kontribusi terhadap upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	67,04	72	100,87
RATA-RATA			93,11
KATEGORI			MEMUASKAN

13. Capaian Sasaran 13
MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Manfaatnya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk merupakan modal bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Meskipun demikian, populasi penduduk yang tidak terkendali juga merupakan ancaman besar bagi ekonomi negara.

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia rata-rata 1, 49 persen/tahun. Itu artinya, setiap tahunnya akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta lebih per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan membawa dampak bagi penyediaan pangan, lahan pertanian, perumahan dan barang konsumsi lainnya. Permasalahan Penduduk di Indonesia dan mungkin juga terjadi di Kabupaten Manggarai adalah jumlah penduduk besar dengan kualitas relatif rendah, laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, fertilitas relatif masih tinggi dengan

penyebaran tidak merata, mortalitas, angka kematian anak masih tinggi, angka kematian ibu masih tinggi, angka harapan hidup relatif rendah, mobilitas, persebaran timpang, urbanisasi, transmigrasi, TKI/TKW dan lain-lain.

Realisasi LPP Kabupaten Manggarai di Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut:

SASARAN 13

MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP)	1,63%	1,72%	94,19
RATA-RATA			94,19
KKATEGORI			MEMUASKAN

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2014 adalah 1,42%, tahun 2015 LPP dengan 0,31% dari target 2% dengan tingkat capaian 184,61% dan tahun 2016 dengan LPP 1,72% dengan tingkat capaian 94,19% dari target 1,63%.

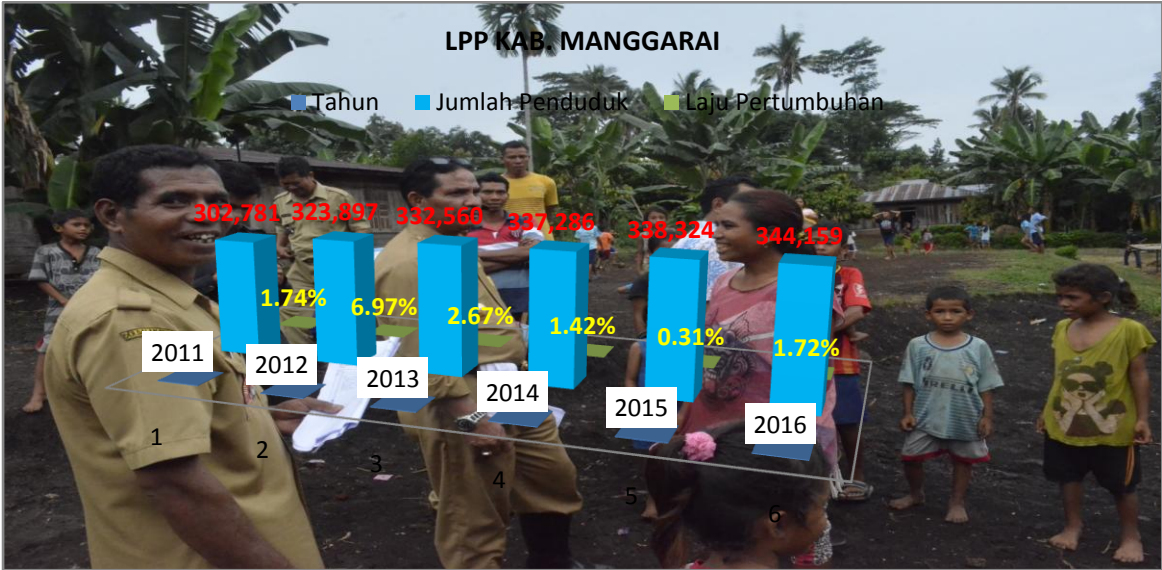
Sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai (data SIAK) tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai adalah 344.159 jiwa atau bertambah 5.835 jiwa dari tahun 2015 yang berjumlah 338.324 jiwa.

Tabel 3.11
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Manggarai tahun 2010 – 2016

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan
2010	297.593	-
2011	302.781	1,74%
2012	323.897	6,97%
2013	332.560	2,67%
2014	337.286	1,42%
2015	338.324	0,31%
2016	344.159	1,72%

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai 2016

Grafik 3.14
LPP Kabupaten Manggarai
Tahun 2010-2016



Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP)	1,72	1,56	89,44
RATA-RATA			89,44
KATEGORI			MEMUASKAN

14. Capaian Sasaran 14
MENURUNNYA UNMET NEED

Unmet Need merupakan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Di dalam rangka menurunkan LPP, sasaran ini diusahakan menurun. Salah satau upaya menurunkan *unmet need* adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB.

SASARAN 14

MENURUNNYA UNMET NEED			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	15,94%	16,41	97,05
RATA-RATA			97,05
KATEGORI			MEMUASKAN

Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi dari indikator di atas adalah 16,41% dari target 15,94% dengan rata-rata capaian 97,05% berkategori MEMUASKAN.

Realisasi ini diperoleh dari Jumlah PUS tak ber-KB yaitu PUS yang ingin anak tapi ditunda (IAT) dan PUS yang tidak ingin anak lagi (TIAL) sebanyak 8.232 dibagi Total PUS riil sebanyak 50.174.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	16,41	14	82,79
RATA-RATA			82,79
KATEGORI			SANGAT BAIK

15. **Capaian Sasaran 15**
MENINGKATNYA APK

Isu strategis Bidang Pendidikan yang dikedepankan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD periode 2016-2021 adalah:

1. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan nasional.
2. Peningkatan mutu dan daya saing SDM dalam rangka memasuki Era Pasar Bebas.

Agar mampu bersaing dalam era globalisasi atau era pasar bebas, pemerintah Kabupaten Manggarai melaksanakan pelayanan pendidikan formal untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar dapat hidup mandiri serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Rata-rata APK Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 diperoleh sebesar 85,82% dari target 85,2% dengan tingkat capaian 100,74% dengan kategori **MEMUASKAN**.

Capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dihitung dari jumlah siswa pada jenjang sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Agar APK meningkat maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai diarahkan pada

kondisi dimana tidak ada lagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Manggarai yang tidak bersekolah karena alasan tidak mempunyai biaya. Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja untuk sasaran *meningkatnya* APK Kabupaten Manggarai ditargetkan dalam RPJMD tahun 2021 yaitu 92,25 berarti masih 6,43% yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mencapai target RPJMD tersebut.

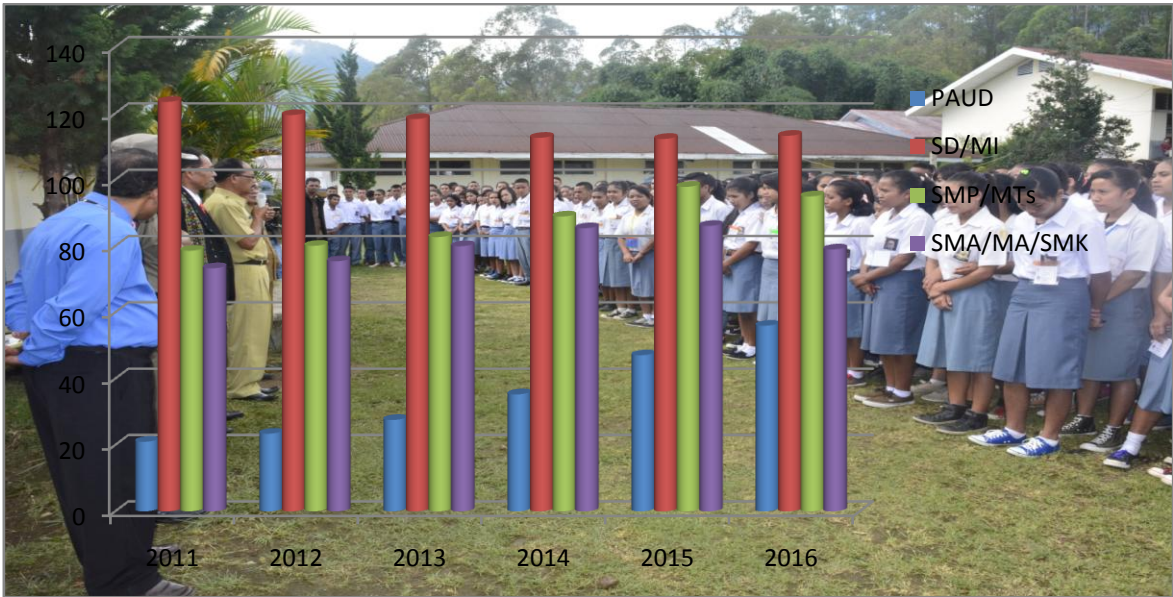
Realisasi APK PAUD yang dicapai tahun 2016 sebesar 56% dari target 54% atau dengan capaian 103,70% dan dikategorikan **memuaskan**. APK SD/MI sebesar 113,27% dari target 100%. Selanjutnya APK anak usia sekolah 13-15 tahun pada level pendidikan SMP/MTs ditargetkan 98,2%, dan realisasi 95% atau 97%. APK SMA/SMK/MA mengalami penurunan dari target 88,6% dan realisasinya 79% dengan tingkat capaian 89%.

APK tertinggi terdapat pada tingkat SD dan SMP dan yang terendah ada pada tingkat SMA. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia sekolah 16-18 tahun yang bersekolah mengalami penurunan, sedangkan pada tingkat SD dan SMP jumlah penduduk usia sekolah dan bersekolah mengalami kenaikan. Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 89.994.589.723,-

Tabel 3.12
*Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai
Tahun 2011-2016*

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	PAUD	21,2	23,43	27,59	35,29	47,09	56
2.	SD/MI	123,51	119,53	118,34	112,66	112,33	113,27
3.	SMP/MTs	78,609	80,11	82,73	88,92	97,87	95
4.	SMA/MA/SMK	73,32	75,42	79,98	85,39	86,10	79

Grafik 3.15
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai



SASARAN 15

MENINGKATNYA APK

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
APK PAUD	54%	56,00	103,70
APK SD/MI	100%	113,27	113,27
APK SMP/MTs	98,20%	95,31	97,05
APK SMA/SMK/MA	88,60%	67,67	76,38
RATA-RATA			97,60
KATEGORI			MEMUASKAN

a. Indikator APK PAUD

APK adalah rasio jumlah siswa PAUD berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat PAUD terhadap jumlah penduduk kelompok usia (4-6 tahun). Jumlah siswa PAUD tahun 2016 adalah 20.345 orang dengan jumlah penduduk usia 4-6 tahun 36.330 Orang. Tingginya capaian APK PAUD Tahun 2016 disebabkan karena semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan PAUD yang didirikan sampai ke desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai sejumlah 279 Unit.

b. Indikator APK SD/MI

APK SD adalah rasio jumlah siswa SD berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD terhadap jumlah penduduk kelompok usia (7-12 tahun). Jumlah siswa SD tahun 2016 adalah 54.517 orang dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun adalah 48.129 orang.

c. Indikator APK SMP/MTs

APK SMP adalah rasio jumlah siswa SMP berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SMP terhadap jumlah penduduk kelompok usia (13-15 tahun). Jumlah siswa SMP tahun 2016 adalah 24.470 orang dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah 25.675 Orang.

d. Indikator APK SMA/MA/SMK

APK SMA adalah rasio jumlah siswa SMA berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SMA terhadap jumlah penduduk kelompok usia (16-18 tahun). Jumlah siswa SMA tahun 2016 adalah 20.577 orang dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 30.408 Orang.

Tabel 3.13
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011 - 2016

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	PAUD	21,2	23,43	27,59	35,29	47,09	56
2.	SD/MI	123,51	119,53	118,34	112,66	112,33	113,27
3.	SMP/MTs	78,609	80,11	82,73	88,92	97,87	95,31
4.	SMA/MA/SMK	73,32	75,42	79,98	85,39	86,10	67,67

Hal-hal yang mendorong meningkatnya rata-rata APK tahun 2016 :

- Aksesibilitas bidang pendidikan semakin mudah
- Adanya perhatian pemerintah bagi siswa miskin dan berprestasi

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan APK ke depan:

- Peningkatan aksesibilitas bidang pendidikan
- Penambahan kuota tenaga pendidik

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut:

MENINGKATNYA APK

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
APK PAUD	56,00	74	75,68
APK SD/MI	113,27	100	113,27
APK SMP/MTs	95,31	100	95,31
APK SMA/SMK/MA	67,67	95,00	71,23
RATA-RATA			88,87
KATEGORI			MEMUASKAN

16. Capaian Sasaran 16

MENINGKATNYA APM

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Pembangunan pendidikan Kabupaten Manggarai dijabarkan melalui agenda peningkatan kecerdasan, budi pekerti dan keterampilan yang digagas melalui program pengembangan pendidikan formal, informal maupun nonformal. Pengembangan sistem manajemen pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan APM. Pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk pengembangan sekolah unggul di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Manggarai. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai diupayakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

SASARAN 16

MENINGKATNYA APM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
APM SD/MI/PAKET A	94,00%	92,44	98,34
APM SMP/MTs/PAKET B	71,61%	56,86	79,40
APM SMA/SMK/MA/PAKET C	62,37%	41,49	66,53
RATA-RATA			81,42
KATEGORI			SANGAT BAIK

Jumlah anggaran yang disediakan adalah Rp. 86.245.128.566. Anggaran ini digunakan untuk membiaya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

a. APM SD/MI/Paket A

APM SD adalah 92,44%. Angka itu dilustrasikan bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, ada 92 orang yang bersekolah di SD. Realisasi ini di dapat dari jumlah penduduk 7-12 tahun yang bersekolah di SD sejumlah 44.492 orang dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 48.129 orang.

Nilai APM akan berkisar antara 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

b. APM SMP/MTs/Paket B

Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 di SMP (56,86%) lebih rendah dibanding SD. Angka ini dihitung dari jumlah penduduk 13-15 tahun yang bersekolah di SMP sejumlah 14.598 orang dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 25.675 orang.

c. **APM SMA/SMK/MA/Paket C**

Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 di SMA (41,49%) lebih rendah dibanding SMP. Angka ini dihitung dari jumlah penduduk 16-18 tahun yang bersekolah di SMA sejumlah 12.617 orang dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 30.408 orang.

Tabel 3.14

*APM Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Manggarai
Tahun 2011-2016*

Tingkat Pendidikan	APM					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI						
Jlh Pend.7-12 thn	56.859	47.205	61.290	49.230	50.037	48.129
Jlh siswa SD usia 7-12 tahun	45.590	46.821	53.327	44.473	46.909	44.492
APM SD/MI	80,18	99,19	87,01	90,34	93,75	92,44
SMP/MTs						
Jlh Pend.13-15 thn	23.627	24.123	29.884	23.596	23.981	25.675
Jlh Siswa SMP usia 13-15 tahun	12.190	13.149	18.722	14.975	17.053	14.598
APM SMP/MTs	51,59	54,51	62,65	63,46	71,11	56,86
SMA/MA/SMK						
Jlh Pend.16-18 thn	21.282	21.729	18.628	20.929	21266	30.408
Jlh Siswa SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun	9.012	9.215	13.159	11.130	12.711	12.617
APM SMA/MA/SMK	42,35	42,41	70,64	53,18	59,77	41,49

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA APM

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
APM SD/MI/PAKET A	92,44	95	97,31
APM SMP/MTs/PAKET B	56,86	73,72	77,13
APM SMA/SMK/MA/PAKET C	41,49	73	56,84
RATA-RATA			77,09
KATEGORI			SANGAT BAIK

17. **Capaian Sasaran 17**

MENINGKATNYA RATA-RATA NILAI UN

Pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai investasi di masa depan. Secara teoritis, pendidikan menjadi dasar dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, serta peningkatan kualitas

peradaban manusia pada umumnya. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai berorientasi pada pengembangan insan yang bermutu/berkualitas dan kompetitif, mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diharapkan bahwa pendidikan di Kabupaten Manggarai mempunyai standar kualitas tinggi dan terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi.

SASARAN 17

MENINGKATNYA RATA-RATA NILAI UN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Angka Kelulusan SD/MI	100%	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100	100
Angka Kelulusan SMA/ SMK/ MA	100%	100	100
RATA-RATA			100
KATEGORI			MEMUASKAN

Capaian indikator *angka kelulusan* untuk semua jenjang pendidikan (*tingkat SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA*) pada tahun 2016 adalah sebesar 100% dengan kategori **memuaskan**. Capaian ini sama dengan tahun 2015 dimana diperoleh capaian kinerja sebesar 100% atau berkategori **MEMUASKAN** dari target sebesar 100%. Capaian ini sudah mencapai target akhir RPJMD tahun 2021, yang ditetapkan sebesar 100%. Angka capaian ini perlu terus dipertahankan sampai dengan akhir periode RPJMD tersebut. Angka capaian kinerja ini diperoleh melalui usaha peningkatan mutu pendidikan yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah melalui **kegiatan try-out**, para siswa semakin banyak dilatih agar semakin siap dan semakin paham dengan materi yang akan diuji pada UN. Capaian kinerja ini terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, guru/pendidik maupun orang tua murid yang sudah mulai peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.

Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi siswa dari KK miskin pada Pendidikan Dasar 12 Tahun. Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan dana bagi para pelajar dan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi untuk bidang pendidikan tertentu seperti kedokteran. Juga

diberikan kesempatan bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dirinya.

Peningkatan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas intelektual, emosional maupun spiritual masyarakat Kabupaten Manggarai. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keluhuran budi pekerti dan karakter kebangsaan yang kuat pada anak didik atau peserta didik.

Anggaran untuk bidang pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBD. Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan kualitas guru, pelajar, sarana belajar, sistem serta manajemen pendidikan yang berorientasi global

18. Capaian Sasaran 18

MENINGKATNYA MINAT BACA MASYARAKAT

Menurut penelitian yang dilakukan ASEAN Libraries (Anna Yulia Blogs, 2011), ditemukan bahwa *masyarakat pada negara-negara yang sedang berkembang masih kental dengan budaya mengobrol dibandingkan dengan budaya membaca*. Hal ini bisa kita lihat misalnya di tempat-tempat umum, ketika mereka antri untuk sesuatu, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengobrol atau melamun dibandingkan dengan membaca buku. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan waktu yang berharga untuk membaca masih rendah.

Minat membaca tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan tahapan perubahan yang muncul secara teratur dan berkesinambungan. Menurut Farida Rahim (2008: 28), minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri.

Perubahan era informasi dan perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat menuntut setiap individu untuk mengikuti perubahan itu agar tidak ketinggalan. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi menuntut kesadaran setiap orang untuk segera menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu dimulai dari yang paling sederhana ialah membaca. Dan salah satu medianya yang murah dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat adalah **perpustakaan**. Perpustakaan adalah tempat membaca untuk menemukan

informasi dengan cara yang paling mudah dan murah. Karena itu Perpustakaan yang ada di Kabupaten Manggarai harus dapat menyediakan bahan pustaka yang sifatnya membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada semua jenjang. Orientasi pelayanan lebih ditekankan pada kepuasan pemakai perpustakaan (*user satisfication oriented*). Karena itu pelayanan yang diberikan harus efektif dan efisien, didukung dengan suasana baca yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya.

SASARAN 18

MENINGKATNYA MINAT BACA MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan umum dan pondok baca	60.000 Orang	56.838	94,73
RATA-RATA			94,73
KATEGORI			MEMUASKAN

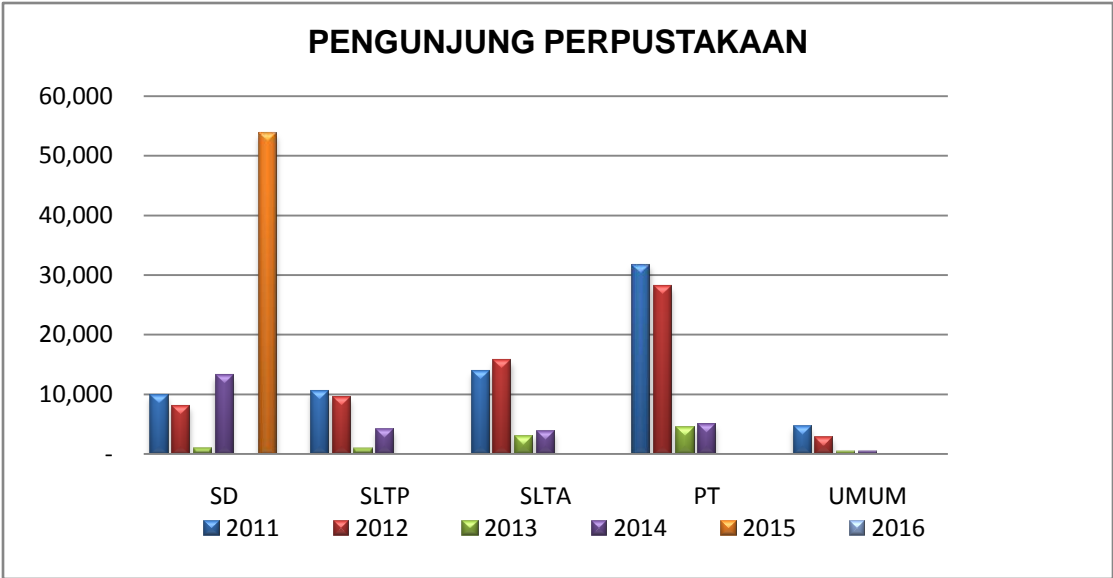
Realisasi dari indikator ini mencapai 56.838 orang dari 60.000 orang yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 94,73% atau dikategori MEMUASKAN.

Realisasi pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Umum dan Pondok Baca, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Data Pengunjung Kantor Perpustakaan Daerah
Tahun 2011- 2016

Kelas	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SD	9.832	8.070	978	13.082	2.966	3.163
SLTP	10.419	9.448	867	4.102	1.371	2.444
SLTA	13.862	15.708	2.982	3.799	4.143	1.418
PT	31.704	28.066	4.386	4.978	3.385	3,735
UMUM	4.593	2.781	419	433	625	358
JUMLAH	70.410	64.073	9.632	26.394	12.490	11.118
Jumlah Pengunjung dikecamatan	51.122	42.330	31.256	34.502	41.168	45.720
JUMLAH	121.532	106.403	40.888	60.896	53.658	56.838

Grafik 3.16
Pengunjung Perpustakaan Daerah
Tahun 2011 - 2016





Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA MINAT BACA MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA	REALISASI s.d 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan umum dan pondok baca	440.215 Orang	733.377	60,03
RATA-RATA			60,03
KATEGORI			CUKUP BAIK

1. Capaian Sasaran 19

MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan. Salah satu penyebab lahan menjadi kritis adalah penebangan liar (illegal logging) dan kebakaran hutan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Manggarai sebesar 25.394,66 Ha. Dari luas kawasan tersebut kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan mencapai 3.657,65 Ha. Besarnya luas lahan kritis di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Manggarai ini disebabkan aktifitas pembalakan liar dan perambahan hutan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan tahun 2016 sama dengan kondisi tahun 2015. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan tahun 2016 tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya bibit tanaman kehutanan siap salur dengan ketentuan spesifikasi tinggi 1 (satu) meter.

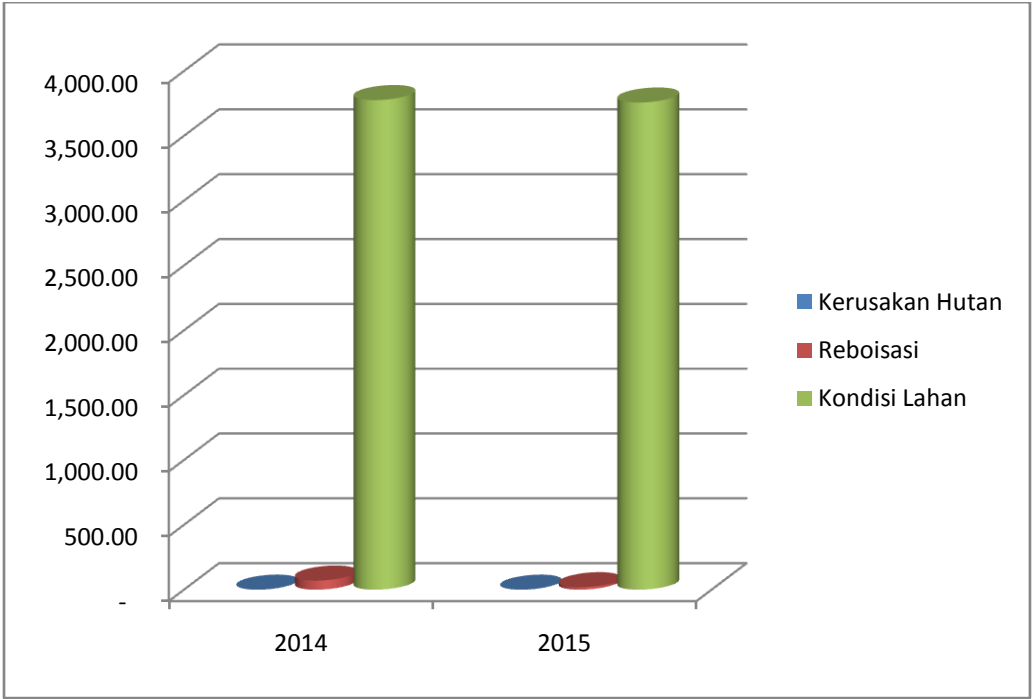
Data kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Data Perkembangan Luas Lahan Kritis
di Dalam Kawasan Hutan
Tahun 2011-2016

No.	Kawasan Hutan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gapong RTK. 18	423,19	425,69	425,69	375,69	375,69	375,69

2.	Meler Kuwus RTK. 111	1.277,25	1.280,75	1.281,15	1.281,15	1.181,15	1.181,15
3.	Todo RTK. 14	751,54	752,54	732,54	733,04	733,04	733,04
4.	Nggalak Rego RTK. 103	453,82	453,82	401,32	382,07	363,07	363,07
5.	Ramut RTK. 15	1.034,13	934,13	934,13	934,13	934,13	934,13
6.	Bajak RTK. 103.A	32,98	32,98	32,98	32,98	32,98	32,98
7.	Pisok RTK 103.C	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59
Jumlah		4.010,50	3.917,50	3.845,40	3.776,65	3.657,65	3.657,65

Grafik 3.17
Kondisi Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan
sampai Tahun 2016



Data kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

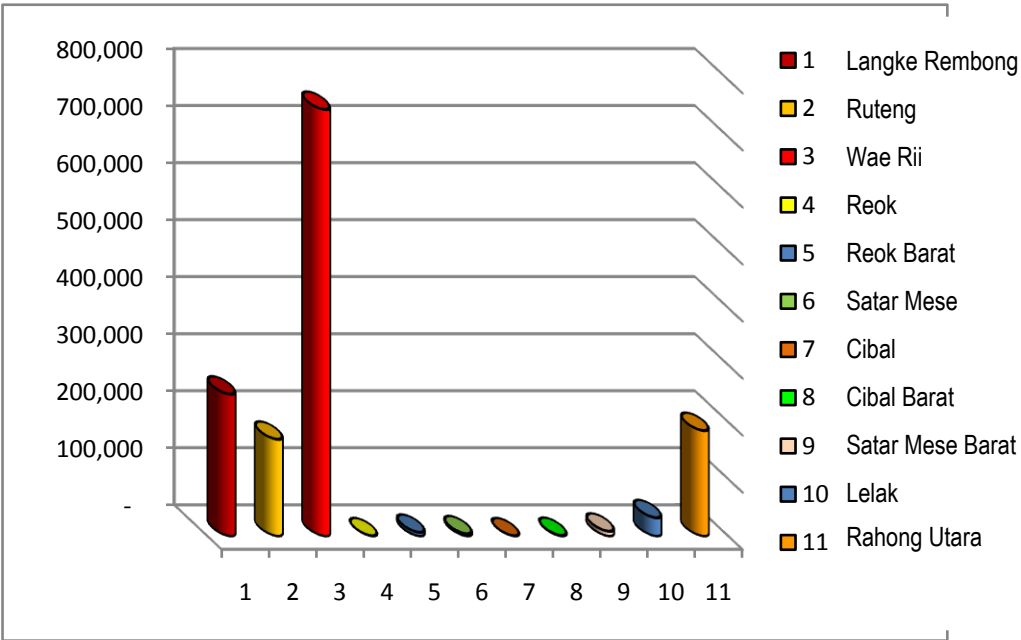
Tabel 3.17
Data Perkembangan Luas Lahan Kritis
di Luar Kawasan Hutan
Tahun 2011-2016

No.	Kecamatan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Langke Rembong	545,97	406,55	395,30	257,80	248,42	248,42
2.	Ruteng	1.123,00	497,33	390,83	183,13	169,25	169,25
3.	Wae Rii	1.611,33	925,65	835,32	766,02	747,64	747,64

4.	Reok	4.200,00	3.654,45	3.505,90	3.436,60	3.428,60	3.428,60
5.	Reok Barat	6.760,18	6.220,18	6.146,58	6.134,98	6.099,80	6.099,80
6.	Satar Mese	4.682,04	3.783,04	3.702,29	3.500,49	3.499,99	3.499,99
7.	Cibal	1.272,87	580,53	380,53	58,73	43,98	43,98
8.	Cibal Barat	1.400,00	1.069,00	1.056,50	676,00	676,00	676,00
9.	Satar Mese Barat	10.204,12	8.480,12	8.346,12	8.119,82	8.025,82	8.025,82
10.	Lelak	522,59	142,59	131,84	62,54	31,66	31,66
11.	Rahong Utara	1.272,85	397,85	358,98	187,08	184,60	184,60
Jumlah		33.594,95	26.157,29	25.250,19	23.383,19	23.155,77	23.155,77

Grafik 3.18

KONDISI LAHAN KRITIS DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2016



SASARAN 19

MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rehabilitasi Lahan Kritis di diluar Kawasan Hutan	23.040,37 Ha	20	0,09
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,45 Ha	0	0
RATA-RATA			0,04
KATEGORI			SANGAT KURANG

a. Rehabilitasi Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan

Realisasi rehabilitasi seluas 20 ha dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah sehingga capaiannya 0,09%, sedangkan Kegiatan Bidang Kehutanan tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya bibit tanaman kehutanan siap salur dengan ketentuan spesifikasi tinggi 1 (satu) meter.

b. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis

Perkembangan luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan pada tahun 2016 sama dengan kondisi pada tahun 2015. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari perubahan beberapa Kegiatan Bidang Kehutanan yang tidak jadi dilaksanakan karena tidak tersedianya bibit tanaman kehutanan siap salur dengan ketentuan spesifikasi tinggi 1 (satu) meter.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Rehabilitasi Lahan Kritis di diluar Kawasan Hutan	20	22.487,77 Ha	0,09
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0	0,46	0,00
RATA-RATA			0,04
KATEGORI			SANGAT KURANG

20. Capaian Sasaran 20

MENURUNNYA PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN

SASARAN 20

MENURUNNYA PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Kerusakan Kawasan Hutan	0,028 Ha	0,028 Ha	100
RATA-RATA			100
KATEGORI			MEMUASKAN

Capaian sasaran ini adalah 100% diperoleh karena tidak terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENURUNNYA LUAS LAHAN KRITIS

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Kerusakan Kawasan Hutan	0,028 Ha	0,028 Ha	100
RATA-RATA			100
KATEGORI			MEMUASKAN

21. Capaian Sasaran 21

TERCAPAINYA AMBANG BATAS PENCEMARAN TANAH, AIR DAN UDARA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SASARAN 21

TERCAPAINYA AMBANG BATAS PENCEMARAN TANAH, AIR DAN UDARA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	10%	1,8	18%
Persentase Pencemaran Mutu Air	2,33%	3,11	133,49
RATA-RATA			75,75
KATEGORI			SANGAT BAIK

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2016 luas wilayah Kabupaten Manggarai sebesar 191.562 ha, luas RTH adalah sebesar 3.444 ha sehingga rasio RTH adalah 1,8% dari target 10% dengan tingkat capaiannya adalah 18%.

b. Persentase Pencemaran Mutu Air

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan pemantauan terhadap 40 mata air yang tersebar di beberapa kecamatan dari 1.286 total sumber mata air yang ada di Kabupaten Manggarai sehingga realisasi dari indikator ini adalah 3,11% dari target 2,33% dengan tingkat capaian 133,49%

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

TERCAPAINYA AMBANG BATAS PENCEMARAN TANAH, AIR DAN UDARA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	1,8	30	6,00
Persentase Pencemaran Mutu Air	3,11	3,11	100
RATA-RATA			53,00
KATEGORI			CUKUP BAIK

22. Capaian Sasaran 22

TERWUJUDNYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DAN MASALAH SOSIAL LAINNYA

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan (BPN) melalui "mediasi". Mediasi adalah salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), di samping negosiasi, arbitrase dan pengadilan.

SASARAN 22

TERWUJUDNYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DAN MASALAH SOSIAL LAINNYA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase bantuan hukum yang tertangani	100%	100	100
Persentase penyelesaian kasus tanah	32,57%	29,41	90,30
RATA-RATA			95,15
KATEGORI			MEMUASKAN

Hasil pengukuran terhadap kedua indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh persentase rata-rata adalah 95,15% dengan kategori MEMUASKAN. Adapun hasil pengukuran dari kedua indikator tersebut sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Bantuan Hukum yang Tertangani

Sesuai data Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus bantuan hukum yang tertangani yaitu *Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Manggarai* dengan persentase capaian 100%.

2. Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Tanah

Pada tahun 2016 tercatat ada 17 kasus yang masuk melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai. Terhadap 17 kasus tersebut yang sudah selesai ditangani baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun kecamatan sebanyak 5 (lima) kasus atau 29,41% dengan persentase capaian kinerja 90,30% dari target 32,57%. Kelima kasus tersebut adalah (1) Masalah tanah akibat pelebaran jembatan Wae Ces jalur Nekang/BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kecamatan Langke Rembong, (2) Masalah tanah yang direncanakan untuk pembangunan Saluran Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PLN di Poco Likang Kecamatan Ruteng, (3) Masalah Tanah Ulayat yang disengketakan antara Warga Kampung Rahong dengan Warga Kampung Nggorong di Bea Rahong Kecamatan Ruteng, (4) Masalah tanah diperkampungan Wejang Kalo yang disengketakan antara Warga Wejang Kalo dengan Warga Torok Kolang di Kecamatan Satar Mese dan (5) Masalah tanah SDI Watu Baur di Watu Baur Kecamatan Reok. Sedangkan 12 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran ini belum sesuai harapan karena belum adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

TERWUJUDNYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DAN MASALAH SOSIAL LAINNYA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Persentase bantuan hukum yang tertangani	100	100	100
Persentase penyelesaian kasus tanah	29,41	48,57	60,55
RATA-RATA			80,28
KATEGORI			SANGAT BAIK

23. Capaian Sasaran 23

MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH

Produk hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku kehidupan bersama yang

dapat dipaksakan pelaksanaanya. Atau dengan kata lain produk hukum adalah setiap peraturan tertulis yang dibuat oleh badan berwenang dan ditaati oleh setiap warga masyarakat.

SASARAN 23

MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan :	340	621	182,65
- Peraturan Daerah	15 bh	11	73,33
- Peraturan Bupati	20 bh	49	245,00
- Keputusan Bupati	300 bh	547	182,33
- Instruksi Bupati	5 bh	14	280,00
RATA-RATA			182,65
KATEGORI			MEMUASKAN

Realisasi capaian kinerja tahun 2016 untuk indikator ini adalah 182,65% dengan kategori MEMUASKAN. Jumlah produk hukum yang ditetapkan sebanyak 621 produk hukum dari 240 yang ditargetkan. Produk hukum yang ditetapkan itu berupa Peraturan Daerah sebanyak 11 Perda dari 15 Perda yang ditargetkan, Peraturan Bupati sebanyak 49 dari target 20 Perbub, Keputusan Bupati sebanyak 457 keputusan dari target 300 Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebanyak 14 Instruksi dari 5 Instruksi yang ditargetkan.

Untuk mewujudkan capaian kinerja sasaran sebagaimana diuraikan di atas, maka anggaran yang terserap sebesar Rp. 519.288.404,- dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 72,50% dari total anggaran perubahan sebesar Rp. 716.250.000,- melalui program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 3.18
Jumlah Produk Hukum
Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016

Tahun	Produk Hukum		
	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
2011	21	22	283
2012	15	25	318
2013	15	46	415
2014	9	46	422
2015	12	44	457
2016	11	49	547
Jumlah	83	232	2.442

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan :	621		36,53
- Peraturan Daerah	11	75	14,67
- Peraturan Bupati	49	100	49,00
- Keputusan Bupati	547	1500	36,47
- Instruksi Bupati	14	25	56,00
RATA-RATA			36,53
KATEGORI			SANGAT KURANG

24. Capaian Sasaran 24

MENURUNNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita” baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung prilaku manusia (seseorang/sekelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok). Kekerasan

yang dialami oleh bangsa Indonesia umumnya dan Kabupaten Manggarai khususnya selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian.

SASARAN 24

MENURUNNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	83 %	81,11	97,72
Persentase penyelesaian pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	90%	81,11	90,12
Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	0,046%	0,02	162,12
RATA-RATA			116,65
KATEGORI			MEMUASKAN

Hasil pengukuran terhadap ketiga indikator kinerja sasaran di atas, diperoleh persentase rata-rata adalah 116,65% dengan kategori MEMUASKAN. Adapun hasil pengukuran dari ketiga indikator tersebut diatas sebagai berikut :

1. Indikator Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Realisasi dari indikator ini mencapai 81,11% dari 83% yang ditargetkan dengan persentase capaian 97,72%. Capaian ini **MEMUASKAN**. Realisasi 81,11% ini diperoleh dari jumlah pengaduan yang selesai ditangani (73 kasus) dari 90 kasus pengaduan.

2. Indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Realisasi dari indikator ini mencapai 81,11 dari 90% yang ditargetkan, dengan persentase capaian kinerja 90,12%, yang berkategori **MEMUASKAN**. Realisasi 81,11% ini diperoleh dari jumlah pengaduan yang selesai ditangani (73 kasus) dari 90 kasus pengaduan.

3. Indikator Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Pada tahun 2016, realisasi dari indikator sasaran ini adalah 0,02% dengan persentase capaian 162,12% dengan kategori **MEMUASKAN**. Realisasi 0,02% diperoleh dari perbandingan jumlah tenaga kerja di bawah umur

sebanyak 23 orang dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 131.986 jiwa.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENURUNNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	81,11	87,00	93,23
Persentase penyelesaian pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	81,11	100,00	81,11
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0,02	0,38	194,74
RATA-RATA			123,03
KATEGORI			MEMUASKAN

25. Capaian Sasaran 25

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan dan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Permasalahan perempuan dan gender telah lama menjadi perhatian berbagai kalangan dan saat ini GENDER menjadi isu global. Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*Prosperity and Justice*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Selama ini peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan (bahkan dalam segala hal) dianggap masih sangat rendah. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam proses pembangunan. Dalam konteks itu, perempuan tidak lagi dipandang sebagai obyek pembangunan. Perempuan harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Perempuan harus didorong dan diberi peran sebagai pelaku pembangunan.

Pemerintah sebagai salah satu domain pembangunan juga melibatkan perempuan. Dengan kata lain, perempuan harus diberi peran juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak maka isu gender hanya menjadi **wacana atau teks** yang jauh dari panggang dan tidak ditempatkan dalam **konteks** isu gender yang semestinya.

Peran perempuan dalam pembangunan yaitu memperdayakan potensi dirinya dan mengaktualisasikan motivasi intelektualnya. Perempuan bukan hanya sekedar agen tetapi juga penggerak pembangunan.

SASARAN 25

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	42%	43,03	102,45
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	66	65,83	99,74
RATA-RATA			101,106
KATEGORI			MEMUASKAN

Hasil pengukuran terhadap kedua indikator kinerja sasaran di atas, diperoleh persentase rata-rata adalah 101,106% dengan kategori MEMUASKAN. Adapun hasil pengukuran dari kedua indikator tersebut sebagai berikut :

- Indikator Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**
 Pada tahun 2016, realisasi dari indikator ini mencapai 43,03% dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,45% dari 42% yang ditargetkan. Capaian ini **MEMUASKAN**. Realisasi 43,03% ini diperoleh dari perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintahan baik PNS, honorer maupun THL (2.366 orang) dengan total PNS, Honorer dan THL Kabupaten Manggarai baik laki-laki maupun perempuan yang mencapai 5.499 orang.
- Indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender)**
 IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Sesuai data dari Kementerian PP-PA melalui Badan PP-PA Provinsi NTT diketahui bahwa Realisasi IPG Kabupaten Manggarai tahun 2016 mencapai 65,83% dari target 66% dengan persentase capaian kinerja 99,74%. Capaian ini terkategori **MEMUASKAN**.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	43,03	6,00	717,17
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	65,83	100,00	65,83
RATA-RATA			391,50
KATEGORI			MEMUASKAN

26. Capaian Sasaran 26

MENINGKATNYA JUMLAH REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KK MISKIN

Pengertian rumah salah satunya merupakan tempat tinggal bagi manusia/masyarakat untuk hidup dan berkembang biak. Namun tidak semua manusia dapat membangun rumah yang layak tinggal karena keterbatasan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pengatur dan penyedia fasilitas dasar bagi masyarakat serta kegiatan sosial dan ekonomi sangat penting, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak huni/tinggal sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

Rumah layak huni menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat memiliki kriteria memenuhi keselamatan bangunan, menjamin persyaratan kesehatan seperti pencahayaan, penghawaan dan sanitasi, dan memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang yang ditargetkan sebesar 100%. Indikator ini dapat tercapai pada periode yang akan datang jika komunikasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat, propinsi serta pemerhati pembangunan Kabupaten Manggarai terus ditingkatkan sehingga bantuan dan kerja sama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin meningkat setiap tahun.

Sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni khusus masyarakat berpenghasilan rendah diukur oleh indikator jumlah rumah layak huni khusus masyarakat berpenghasilan rendah dan presentase rumah tangga pengguna listrik sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

SASARAN 26

MENINGKATNYA JUMLAH REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KK MISKIN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rumah layak huni	87,78%	85,55	97,46
Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	79,23%	77,66	98,02
Persentase rumah Tangga Pengguna Listrik	71,3%	50,17	70,36
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	6.096 Unit	2.492 Unit	40,88%
RATA-RATA			76,48
KATEGORI			SANGAT BAIK

Hasil pengukuran terhadap keempat indikator kinerja sasaran di atas, diperoleh persentase rata-rata adalah 76,48% dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun hasil pengukuran dari keempat indikator tersebut sebagai berikut :

a. Indikator Persentase Rumah Layak Huni

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 81,13% atau 45.699 unit rumah dari total rumah 56.328 unit dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4,42%. Realisasi Rumah Layak Huni sebesar 85,55% dari target 87,78% dengan tingkat capaian 97,46% atau kategori MEMUASKAN.

b. Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Untuk indikator “*Persentase rumah tangga pengguna air bersih*” pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 79,23% dari total penduduk 344.159 jiwa atau 84.770 KK, namun realisasinya adalah 72,08% dari total penduduk. Capaian dari indikator ini adalah 90,98% dengan kategori MEMUASKAN.

Dari realisasi di atas dapat dijelaskan bahwa dari total penduduk 344.159 jiwa atau 84.770 KK, jumlah penduduk yang berakses Air Minum Bersih (AMB) adalah 267.288 jiwa atau 53.458 KK atau rumah tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang, indikator jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih termasuk dalam salah satu indikator SPM yakni tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari yang ditargetkan sebesar 100%.

c. Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pada tahun 2016, realisasi kinerja untuk indikator sasaran ini 50,17% dari target 71,30% dengan persentase capaian 70,36% atau kategori **BAIK**.

Pencapaian ini diperoleh dari banyak Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Manggarai tahun 2016 sebanyak 34.531 RT Pengguna Listrik dibandingkan dengan total rumah tangga sebanyak 68.832 RT.

d. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan dana APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2016 sebesar Rp.2.610.978.672 dengan realisasi sebesar Rp.1.305.489.336. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sejumlah 2.492 unit dalam bentuk bantuan **Bahan Bangunan Rumah (BBR)**. Capaian dari indikator ini adalah 40,88% atau 2.492 unit dari target 6.096 unit berkategori **KURANG**.

Rumah layak huni menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat memiliki kriteria memenuhi keselamatan bangunan, menjamin persyaratan kesehatan seperti pencahayaan, penghawaan dan sanitasi, dan memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang yang ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2015 Pemerintah Manggarai membangun rumah layak huni sebanyak 1.441 unit.

Pemerintah Kabupaten Manggarai beroptimis bahwa indikator ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang dengan hadirnya **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**. Salah tugas Dinas ini adalah membangun 1.000 unit rumah per tahun selama empat tahun ke depan (sesuai periode RPJMD, tahun 2016 adalah tahun pertama). Di

samping itu juga adanya program Kerja Berkantor di Desa untuk memverifikassi data orang miskin (khusus variabel penciri kemiskinan yang berkaitan dengan rumah).

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA JUMLAH REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KK MISKIN

INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Persentase rumah layak huni	85,55	97.56	87,69
Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	77,66	100	77,66
Persentase rumah Tangga Pengguna Listrik	50,17	90,99	55,14
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	6.634 Unit	13.913	47,68
RATA-RATA			67,04
KATEGORI			BAIK

27. Capaian Sasaran 27
MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS

Hasil pembangunan kesejahteraan sosial tercermin dari meningkatnya perkembangan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial di masyarakat dalam menghadapi masalah sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial khususnya. Peningkatan kesadaran dan kesetiakwanan itu dapat menumbuhkan iklim yang mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masalah-masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat karena masih kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Hal semacam ini dapat menyebabkan munculnya pelbagai permasalahan sosial. Karena itu kemiskinan dan keterbelakangan arus dicarikan pemecahannya secara terencana, terintegrasi dan menyeluruh. Dengan kata lain kemiskinan itu harus dientaskan.

Yang dimaksudkan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Manggarai adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan

narkotika dan zat adiptif lainnya, ketunaan sosial, korban tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, eks penyakit kronis, eks penyakit social dan korban bencana.



Sasaran meningkatnya penanganan PMKS didukung oleh satu indikator dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 27

MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	70,17%	65,49%	93,32
RATA-RATA			93,32
KATEGORI			MEMUASKAN

Data Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Manggarai Tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Manggarai sebanyak 7.481 orang. Dari jumlah tersebut, yang diintervensi Tahun 2016 adalah 208 orang dengan rincian Anak Terlantar 23 orang, Warsosek 65 orang, Penyandang Cacat 20 orang, Lansia 40 orang, Penghuni Panti 40 orang serta Eks Napi 20 orang. Dari total 7.481 orang tersebut, yang sudah diintervensi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 4.691 orang ditambah 208 orang yang diintervensi tahun 2016. Dengan demikian jumlah PMKS yang diintervensi sampai dengan tahun 2016 adalah 4.899

orang dari 7.481 atau sebesar 65,49% dari target 70,17% dengan tingkat capaian 93,32% berkategori **MEMUASKAN**.

Dan target akhir RPJMD tahun 2021 diharapkan PMKS yang perlu mendapat bantuan sosial jumlahnya semakin menurun atau tuntas 100%.

SASARAN 27

MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET RPJMD 2021	CAPAIAN (%)
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	65,49% (4.899)	100% (7.481)	65,49
RATA-RATA			65,49
KATEGORI			CUKUP BAIK

28. **Capaian Sasaran 28**

TERTIBNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Keuangan dan aset daerah merupakan urat nadi pembangunan suatu daerah dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa waktu APBD meliputi masa satu tahun yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Anggaran Pendapatan Daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
- Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

- Lain-lain dana yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraa tugas pemerintahan di daerah.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Setelah APBD dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi oleh APIP atau unsur pengawasan lainnya yang berkompeten dengan tujuan menilai kebenaran formal dan material atas penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan/kekurangan selama pelaksanaan APBD.

SASARAN 28

TERTIBNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kebocoran Keuangan Negara/ Daerah	0,40%	0,21%	147,52
RATA-RATA			147,52
KATEGORI			MEMUASKAN

Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2015, ditemukan kerugian Daerah sebesar Rp.1.820.799.707,56 terhadap realisasi belanja APBD sebesar Rp.867.340.394.824,00 atau 0,21% dari target 0,4% dengan tingkat capaian 147,52% berkategori MEMUASKAN.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

TERTIBNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Tingkat Kebocoran Keuangan Negara/Daerah	0,21%	0,32%	134,38
RATA-RATA			134,38
KATEGORI			MEMUASKAN

29. Capaian Sasaran 29

MENINGKATNYA TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APIP DAN BPK RI

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) *“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Temuan kerugian negara/daerah dalam setiap pemeriksaan baik yang dilaksanakan oleh APIP maupun oleh BPK RI Perwakilan NTT memberikan beberapa rekomendasi atas temuan untuk ditindaklanjuti dengan realisasi seperti dalam tabel berikut :

SASARAN 29

MENINGKATNYA TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APIP DAN BPK RI

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	76,38%	66,12	86,57
Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	54,68%	37,48	68,54
RATA-RATA			77,56
KATEGORI			SANGAT BAIK

a. Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT pada tahun 2016, dari 18 LHP terdapat 246 temuan dengan 605 saran/rekomendasi dan yang sudah ditindalanjuti sebanyak 400 rekomendasi atau 66,12% dari target 76,38% dengan tingkat capaian kinerja 86,57% dikategorikan MEMUASKAN.

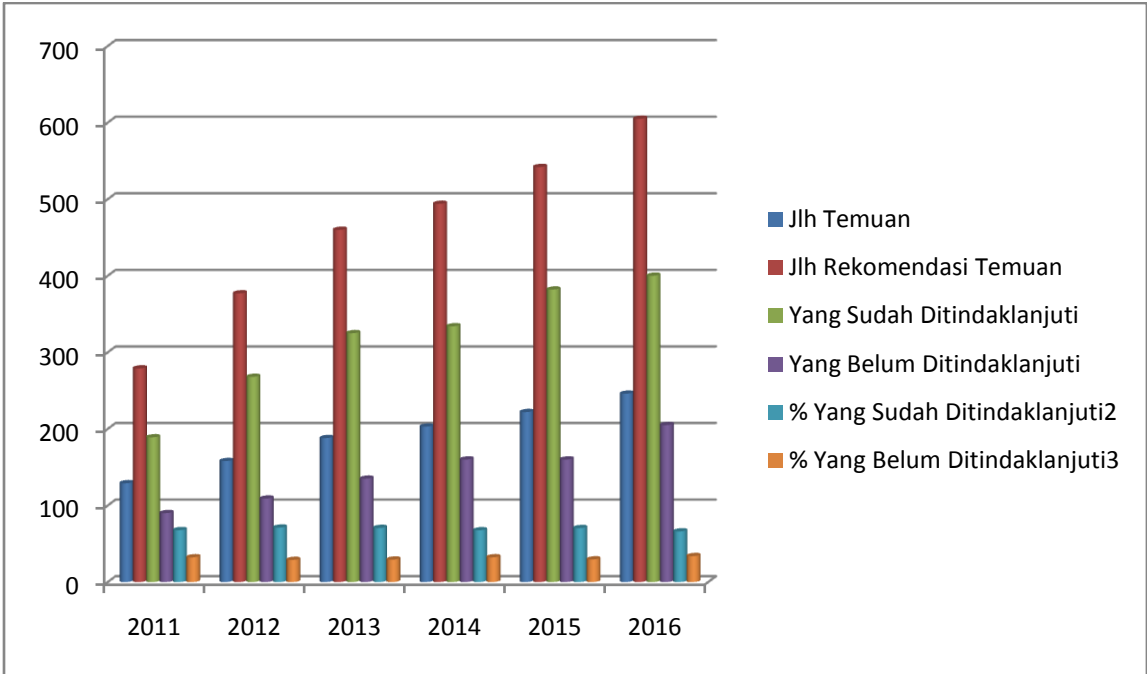
Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan tahun 2016, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
 Jumlah Temuan Auditor Eksternal yang Ditindaklanjuti
 Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Jlh Temuan	Jlh Rekomendasi Temuan	Yang sudah ditindaklanjuti	%	Yang Belum ditindaklanjuti	%
1.	2011	129	279	189	67,74	90	32,26
2.	2012	158	377	268	71,09	109	28,91
3.	2013	188	460	325	70,65	135	29,35
4.	2014	203	494	334	67,61	160	32,29
5.	2015	222	542	382	70,48	160	29,52
6.	2016	246	605	400	66,12	205	33,88

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Manggarai Tahun 2016

Grafik 3.19
 Temuan Auditor Eksternal yang Ditindaklanjuti
 Tahun 2011-2016



Berikut ini data kerugian negara/daerah berdasarkan temuan tahun pemeriksaan 2005-2015 yang terdata pada tahun 2011-2016, sebagai berikut :

Tabel 3.20
Tindaklanjut terhadap Hasil Temuan
Auditor Eksternal BPK RI Perwakilan NTT
2011 – 2016

No.	Thn	Jumlah Temuan	Jlh Kerugian / Kewajiban Setor ke Negara / Daerah (Rp)	Jlh Penyetoran Keuangan ke Kas Negara / Daerah (Rp)	%	Tunggakan Penyetoran (Rp)	%
1.	2011	129	6.423.694.618,73	2.677.619.724,95	41,68	3.746.074.893,78	58,32
2.	2012	158	7.169.720.942,29	2.735.692.524,95	38,16	4.434.028.417,34	61,84
3.	2013	188	10.473.548.013,52	3.678.083.677,02	35,12	6.795.464.336,50	64,88
4.	2014	203	13.827.801.937,14	7.463.550.519,12	53,97	6.364.251.418,02	46,03
5.	2015	222	14.106.983.293,25	9.666.183.823,68	68,52	4.440.799.469,57	31,48
6.	2016	246	11.836.108.933,70	7.616.604.853,18	66,12	4.219.504.080,52	33,88

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Manggarai (data akumulasi) thn. 2016

Dari tunggakan temuan keuangan senilai Rp. 4.219.504.080,52 tersebut, terdapat temuan keuangan yang *tidak dapat ditindaklanjuti* lagi dengan alasan yang sah sebesar Rp.2.160.346.242,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. LHP Nomor : 16.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010 tanggal 23 Mei 2010 atas LKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp.2.134.216.696,00 yang diakibatkan dana klaim Jamkesmas dan Askes pada RSUD Ruteng, tidak dicatat sebagai pendapatan daerah. Dana ini tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah digunakan oleh RSUD Ruteng untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
2. LHP Nomor : 093.c/Pwk.BPK.RI di Kpg/07/2007 tanggal 20 Juli 2007, berupa PPN dan PPh atas belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 belum dipungut dan disetor ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp.77.559.759,00. Dari dana sebesar Rp.77.559,759,00 tersebut yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp.51.430.213,00. Sisa dana sebesar Rp.26.129.546,00 tidak dapat ditindaklanjuti karena rekanan yang bertanggung jawab atas temuan tersebut sudah meninggal dunia.

Dengan demikian sisa temuan keuangan Auditor Eksternal BPK RI sampai tahun 2016 adalah Rp.4.219.504.080,52.

b. Indikator Persentase Temuan APIP yang Ditindaklanjuti

Sesuai data dari Inspektorat Kabupaten Manggarai tahun 2016, temuan APIP pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun pemeriksaan 1999/2000 s/d 2016 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 37,48%, dimana dari 6.566 buah rekomendasi yang diberikan oleh APIP terhadap 4.850 buah temuan. Yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 2.461 buah rekomendasi, 1.238 dalam proses tindak lanjut dan 2.867 belum ditindaklanjuti. Persentase capaian kinerja dari indikator sasaran ini 65,55% dari target 54,68% dengan kategori BAIK.

Tabel 3.21
Rekapitulasi Temuan APIP
2011 - 2016

No	Thn	Nama APFP	Jumlah Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum	Jlh Kerugian / Kewajiban Setor ke Negara / Daerah (Rp)	Jlh Penyetoran Keuangan ke Kas Negara / Daerah (Rp)	%	Tunggakan Penyetoran (Rp)	%
1.	2011	- BPKP Perw. NTT	286	105 (36,71%)	25 (8,74)	156 (54,54%)	5.204.291.379,16	3.476.919.172,08	66,81	1.727.372.207,08	33,19
		- Inspektorat Jendral Kemendagri/Kemendagri Teknis	61	25 (40,98%)	21	15	183.563.278,08	138.728.354,08	75,58	44.834.924	24,42
		- Inspektorat Provinsi NTT	461	426 (92,41)	7	28	1.945.809.632,69	418.951.559,81	21,53	1.526.858.072,88	78,47
		- Inspektorat Kabupaten Manggarai	2.087	811 (38,86%)	589	687	15.511.282.696,75	7.289.134.833,77	46,99	8.222.147.862,98	53,01
2.	2012	- BPKP Perw. NTT	377	268 (71,09%)	87	22	7.169.720.942,29	2.735.692.524,95	38,16	2.160.346.242	61,84
		- Inspektorat Jendral Kemendagri/Kemendagri Teknis	139	65 (46,76)	15	59	183.563.278,08	153.233.278,08	83,48	30.330.000	16,52
		- Inspektorat Provinsi NTT	495	458 (92,53)	8	29	1.966.291.883,49	452.496.375,49	23,01	1.513.795.508	76,99
		- Inspektorat Kabupaten Manggarai	2.542	1.031 (40,56%)	719	770	16.082.293.934,12	7.622.579.664,72	47,40	8.459.714.269,40	52,60
3.	2013	- BPKP Perw. NTT	466	338 (72,53%)	15	113	6.790.143.035,65	5.507.352.577,65	81,11	1.282.790.458	18,89
		- Inspektorat Jendral Kemendagri/Kemendagri Teknis	61	25 (40,98%)	21	15	183.563.278,08	162.122.278,08	88,32	21.441.000	11,68

		- Inspektorat Provinsi NTT	494	484 (97,98%)	8	2	1.960.219.224	462.645.717	23,60	1.497.573.507	76,40
		- Inspektorat Kabupaten Manggarai	3.118	1.263 (40,51%)	992	863	17.009.282.813,22	8.198.408.501,18	48,20	8.810.874.312,04	51,80
4.	2014	- BPKP Perw. NTT	532	363 (68,23%)	23	146	7.727.341.523,65	5.860.530.085,65	75,84	1.866.811.438	24,16
		- Inspektorat Jendral Kemendagri/Kemendagri Teknis	61	25 (40,98%)	21	15	183.563.278,08	163.536.278,08	89,09	20.027.000	10,91
		- Inspektorat Provinsi NTT	586	512 (87,37%)	12	62	2.014.803.886,88	460.469.210,23	22,85	1.554.334.676,65	77,15
		- Inspektorat Kabupaten Manggarai	3.644	1.260 (34,58%)	1046	1338	18.505.728.327,86	8.855.751.209,36	47,85	9.649.977.118,50	52,15
5.	2015	- BPKP Perw. NTT	571	367 (64,27%)	22	182	7.981.317.386,65	5.875.429.581,35	64,27	2.105.887.805,30	35,73
		- Inspektorat Jendral Kemendagri/Kemendagri Teknis	61	25 (40,98%)	21	15	183.563.278,08	163.536.278,08	89,09	20.027.000	10,91
		- Inspektorat Provinsi NTT	618	557 (90,13%)	13	48	2.245.121.510,88	648.570.338,23	28,89	1.596.551.172,65	71,11
		- Inspektorat Kabupaten Manggarai	4.129	1.383 (33,49%)	1.149	1.597	20.312.238.750,50	9.555.048.597,87	47,04	10.757.190.152,63	52,96
6.	2016	- BPKP Perw. NTT	571	367 (64,27%)	22	182	7.981.317.386,65	5.875.429.581,35	73,61	2.105.887.805,30	26,39
		- Inspektorat Jendral Kemendagri/Kemendagri Teknis	61	25 (40,98%)	21	15	183.563.278,08	163.536.278,08	89,09	20.027.000,00	10,91

		- Inspektorat Provinsi NTT	665	586 (88,125)	21	58	2.245.121.510,88	709.963.157,23	31,62	1.535.158.353,65	68,38
		- Inspektorat Kabupaten Manggarai	4.129	1.433 (34,71%)	1.149	1.547	20.312.238.750,50	9.555.048.597,87	47,04	10.757.190.152,63	52,96
		- Tambahan PKPT 2016	1.140	50 (4,39%)	25	1.065	2.359.358.483,12		0,00		0,00

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Manggarai (data akumulasi) Tahun 2016

Upaya untuk meningkatkan tindaklanjut temuan APIP ini, maka setiap tahun Inspektorat Kabupaten Manggarai melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, melaksanakan 4 (empat) kegiatan pokok yaitu inventarisasi temuan pengawasan; tindaklanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan melakukan analisis berkala temuan hasil pengawasan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target terhadap ketiga indikator tersebut di atas adalah :

- Terbatasnya jumlah personil pada Inspektorat.
- Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Manggarai untuk Inspektorat.
- Ketaatan Obrik untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APFP masih rendah.
- Laporan hasil pemeriksaan APFP belum dimanfaatkan secara optimal oleh obrik dalam menganalisis pelaksanaan tugas pokok serta penatausahaan administrasi SKPD, sehingga sering ditemukan kelemahan yang sama secara berulang.
- Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengendalian internal (SPI).

Untuk mengatasi permasalahan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mendorong pimpinan SKPD/Obrik untuk secara pro aktif menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaaan APIP dan BPK RI.
- Aspek pemeriksaan akan lebih difokuskan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Obrik.
- Menambah jumlah tenaga fungsional sesuai tuntutan kompetensi, dan juga mengadakan diklat teknis untuk peningkatan kapasitas pejabat fungsional.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APIP DAN BPK RI

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	66,12	100	66,12
Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	37,48	100	37,48
RATA-RATA			51,80
KATEGORI			CUKUP BAIK

30. Capaian Sasaran 30

MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan data perkembangan kependudukan bertujuan untuk mengetahui jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilisasi, kualitas dan penyebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan. Gambaran mengenai penduduk dapat dilihat dari kualitas (jumlah, struktur dan komposisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran penduduk).

Hasil pendaftaran penduduk antara lain pencatatan biodata penduduk dan pencatatan atas pelaporan peristiwa, baik yang dilakukan oleh petugas register maupun yang dilaporkan sendiri oleh penduduk. Sedangkan pencatan sipil antara lain pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak dan pencatatan peristiwa penting lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut serta untuk menghasilkan database Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Valid dan Akurat maka Pemerintah Daerah pada tahun 2015 melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai telah melakukan penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan Kabupaten

Manggarai Tahun 2016. Dokumen tersebut akan dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan program kerja pemerintah selanjutnya.

SASARAN 30

MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,68	0,70	102,70
Rasio pasangan berakte nikah	0,04	0,037	91,95
Kepemilikan KTP Elektronik	66	69,83	105,80
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	247,6	249,68	100,84
RATA-RATA			100,32
KATEGORI			MEMUASKAN

Dari table tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa rata-rata capaian kinerja dari keempat indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah 100,32% dengan kategori *Memuaskan*.

Lebih lanjut capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebagai berikut :

1. Indikator Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Realisasi dari indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 adalah 0,70 dari 0,68 yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 102,70%. Capaian ini diperoleh atas dasar perhitungan rasio penduduk yang memiliki KTP sebanyak 157.979 orang per satuan penduduk wajib KTP 226.224 penduduk. Realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan antara lain disebabkan :

- Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang kewenangan pencetakan KTP elektronik yang semula adalah kewenangan pusat menjadi kewenangan setiap kabupaten/kota sejak Tanggal 25 September 2014.
- Adanya persyaratan dari lembaga-lembaga lain yang mewajibkan kepemilikan KTP elektronik dalam pengurusan administrasi pada lembaga-lembaga yang bersangkutan.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP elektronik.

Tabel 3.22

Tabel Jumlah Penduduk dan Perkembangan Kepemilikan KTP
di Kabupaten Manggarai tahun 2011 - 2016

No.	Tahun	PENDAFTARAN PENDUDUK			
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Wajib KTP	Penduduk Ber-KTP	
				Jumlah	%
1	2011	302.781	199.932	84.724	42,38
2	2012	323.897	196.224	126.970	64,71
3	2013	332.560	200.420	101.658	50,72
4	2014	337.286	213.679	113.622	53,17
5	2015	338.324	217.925	129.386	59,37
6	2016	344.159	226.224	157.979	69,83

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Tahun 2016

2. Indikator Rasio Pasangan Berakta Nikah

Realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2016 adalah 0,037. Rasio 0,037 ini diperoleh dari perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah per jumlah pasangan nikah. Tahun 2016 terdapat 3.118 akta nikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dengan jumlah pasangan nikah sampai dengan tahun 2016 sebanyak 84.770 pasangan nikah. Persentase capaian dari indikator ini mencapai 91,95% dengan kategori **MEMUASKAN**.

3. Indikator Kepemilikan KTP Elektronik

Capaian Indikator dari sasaran ini adalah 105,80%. Capaian ini diperoleh atas dasar perhitungan jumlah penduduk yang memiliki E-KTP per satuan penduduk yakni 157.979 E-KTP yang sudah dicetak dari 226.224 wajib KTP (69,83%) atau melampaui 3,83% dari target yang ditetapkan 66%.

4. Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk

Indikator *kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk* mencapai 85.929 akta kelahiran yang diterbitkan dari 344.159 penduduk atau mencapai 249,68 dari target 247,6 per 1000 jumlah penduduk (100,84%). Pencapaian ini melampaui terget yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja disebabkan

karena semakin meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran terutama penduduk yang baru lahir. Pencapaian indikator sasaran ini karena :

- Adanya peraturan daerah tentang denda keterlambatan jika mengurus akta kelahiran setelah 60 hari terjadinya peristiwa kelahiran.
- Adanya persyaratan dari lembaga-lembaga lain yang mewajibkan kepemilikan Akta Kelahiran dalam pengurusan administrasi pada lembaga-lembaga bersangkutan; (contoh : sekolah-sekolah yang mewajibkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak didiknya).

Tabel 3.23
Perkembangan Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta-akta Sipil
di Kabupaten Manggarai Tahun 2011 - 2016

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pasangan Nikah	Perkembangan Jumlah dan Prosentase Kepemilikan Akta-akta Sipil			
				Jenis Akta Pencatatan Sipil			
				Kelahiran*)	%	Perkawinan**)	%
1	2011	302.781	67.670	66.724	22,04	1.647	2,43
2	2012	323.897	74.517	69.579	21,48	2.001	2,69
3	2013	332.560	71.588	72.966	21,94	2.291	3,20
4	2014	337.286	75.577	75.834	22,48	2.565	3,39
5	2015	338.324	75.877	79.768	23,57	2.841	3,74
6	2016	344.159	84.770	85.929	24,97	3.118	3,68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

Catatan : *) Berbanding total jumlah penduduk

**) Berbanding total jumlah Pasangan Nikah

Dari tabel tersebut di atas tergambar sampai dengan tahun 2016 sebanyak 24,97% yang memiliki akta kelahiran atau 85.929 jiwa dari 344.159 jumlah penduduk, sedangkan akta perkawinan sebesar 3,68% atau 3.118 akta nikah dari 84.770 pasangan nikah.

Faktor yang menjadi penyebab sehingga beberapa indikator kinerja dari sasaran ini tidak sesuai target yang telah ditetapkan adalah :

- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas yang terkait akan pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan (Akta-akta pencatatan sipil).

- Kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan (Akta-akta pencatatan sipil) masih kurang.
- Belum optimalnya kerjasama lintas sektor terutama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Pelayanan dokumen akta-akta pencatatan sipil masih dilakukan di Tingkat Kabupaten.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- Sosialisasi secara berjenjang dan terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta-akta pencatatan sipil) beserta dampak hukumnya.
- Kerjasama lintas SKPD terus ditingkatkan.
- Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan metode *stelsel aktif* yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang semula diwajibkan aktif adalah masyarakat/penduduk diubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan pelayanan keliling.
- Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas registrasi penduduk desa/kelurahan dan kecamatan.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,70	1	70,00
Rasio pasangan berakte nikah	0,037	0,096	38,54
Kepemilikan KTP Elektronik	69,83	100	69,83
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	249,68	309,67	80,63
RATA-RATA			64,75
KATEGORI			CUKUP BAIK

31. Capaian Sasaran 31

MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang handal dan mampu berdaya saing. Tenaga kerja

yang tidak kompetens dan tidak produktif akan menghasilkan pengangguran dengan segala implikasinya. Dalam RPJMD disebutkan bahwa Tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai disebabkan rendahnya keterampilan kerja dan jiwa berwirausaha, keterbatasan lapangan kerja karena lambanya perkembangan industri dalam daerah, kurangnya kreatifitas dan inovatif, sistem pendidikan yang lebih menekankan pada pengetahuan (*knowledge*) dari pada keterampilan (*skill*).

Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan Pelatihan Tenaga Kerja agar mampu bersaing menghadapi pasar kerja yang sarat dengan kompetisi atau sekurang - kurangnya dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan bakat dan minat.

SASARAN 31

MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,54	68,87	100,48
Pencari kerja yang ditempatkan	25,56	16,07	62,88
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90	90	100
Rasio daya serap tenaga kerja	10,22	19,67	192,47
Rasio penduduk yang bekerja	96,41	96,01	99,59
RATA-RATA			111,08
KATEGORI			MEMUASKAN

Realisasi sasaran dari kelima indikator di atas adalah 111,08% dengan kateogor MEMUASKAN, dapat diuraikan sebagai berikut :

Data statistik Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa penduduk Manggarai yang masuk dalam angkatan kerja tahun 2016 sebanyak 137.440 orang. Penduduk pada kelompok ini sering disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Selanjutnya realisasi TPAK Kabupaten Manggarai tahun 2016 diperoleh sebesar 68,87% dari target 68,54% dengan capaian kinerja sebesar 100,48% atau berkategori **memuaskan**. TPAK merupakan rasio angkatan kerja yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 masih baik

walaupun realisasinya masih di bawah Kabupaten Manggarai Barat sebesar 71,39%.

Demikian pula dengan pencapaian target dalam dokumen RPJMD bahwa sampai dengan tahun 2021 target TPAK Kabupaten Manggarai sebesar 70%.

Realisasi pencapaian tahun 2016 sebesar 68,54% berarti Pemda harus berupaya sebesar 1,46% selama empat tahun ke depan.

a. Indikator Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Ditempatkan

Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan bahwa jumlah pencari kerja pada Tahun 2016 (berdasarkan data AK1) 56 orang; dengan rincian Laki-laki = 20 orang dan Perempuan = 36 orang. Dari 56 orang tersebut, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan = 9 orang atau 16,07% dari target 25,56% dengan tingkat capaian 66,88%, kategori BAIK.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pencari kerja yang terdaftar dan yang siap kerja berjumlah 86 orang dari target 119 orang yang terdaftar atau 72,27%. Sedangkan 33 orang yang mendaftar tidak mengembalikan Kartu Kuning/AK1 ke Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tidak bisa diketahui tenaga kerja yang mendaftar dan ditempatkan. Tenaga kerja yang dipersiapkan diharapkan mampu bersaing di dalam lapangan usaha/kerja yang ada.

b. Indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tingkat capaian indikator ini sebesar 100% dengan kategori MEMUASKAN. Capaian ini diperoleh dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pelatihan kewirausahaan berjumlah 50 (lima puluh) orang melalui terapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian berupa pengolahan hasil :
 - Membuat Kue Labu Kuning, Membuat Rempeyek Bayam, Cake Kukus Labu Kuning, Kue Kacang Tanah, Donat Ubi, Kue Bola Tintin, Dodol Kacang Tana, Pisang Kacang Hijau, Brongkos Pisang, Talas Goreng Pisang Keju Kukus, Pulung-pulung

Singkong, Stik Singkong, Roti Labu Kuning, Kue Jahe, Kue Semprit, Kue Kering Kopi, dan Jenis Kue Lainnya.



2. Pelatihan Otomotif Memperbaiki Motor Pengangkut sampah roda 3 milik Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 4 unit. Keempat unit motor tersebut sama sekali tidak berfungsi dan setelah diperbaiki ada 3 unit yang dapat berfungsi kembali, meski kurang maksimal karena masih ada spare part lama yang tidak dapat diganti. Satu unit yang tidak dapat diperbaiki karena kerusakanya sangat parah. Pelatihan otomotif ini diikuti 40 (empat puluh) orang.



c. Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Realisasi indikator ini tahun 2016 sebesar 19,67% dari target 10,22% dengan capaian kinerja 92,47% kategori MEMUASKAN. Realisasi ini diperoleh dari Perbandingan antara Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada PMA/PMDN terhadap Jumlah PMA/PMDN. Jumlah Tenaga Kerja 177 orang dan Jumlah Perusahaan 9 buah.

d. Indikator Rasio Penduduk Yang Bekerja

Sesuai data BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2016, Penduduk yang bekerja adalah 131.963 dan yang mencari pekerjaan adalah 5.477. Dengan demikian dari target 96,41 % realisasinya 96,01%, dengan tingkat capaian dari indikator ini adalah 99,59% dengan kategori MEMUASKAN.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,87	70,00	98,39
Pencari kerja yang ditempatkan	16,07	45,56	35,27
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90	2000	4,50
Rasio daya serap tenaga kerja	19,67	10,22	192,47
Rasio penduduk yang bekerja	96,01	97,79	98,18
RATA-RATA			85,76
KATEGORI			MEMUASKAN

32. Capaian Sasaran 32

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

SASARAN 32

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	36,37	9,41	25,88
Jumlah masyarakat yang terlayani dengan program JAMKESDA	500	668	133,60
Angka kriminalitas	11,67	5,49	152,94
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Manggarai	100	100	100
Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Manggarai	B (62,25)	CC (58,69)	94,28%
RATA-RATA			101,34
KATEGORI			MEMUASKAN

a. Indikator Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat secara luas.

Rasio tenaga linmas pada tahun 2016 adalah 324 atau 1:9 dari total penduduk 344.159 jiwa, dengan tingkat capaian 25,88%. Sedangkan Tahun 2015 adalah 1.200 orang atau 3,54 dari total penduduk 338.324 jiwa, tahun 2014 adalah 1.694 atau 5,02 dari total penduduk 337.286 jiwa. Pada tahun 2013 adalah 1.714 orang atau 63,15% dari 2.714 orang yang ditargetkan. 1.714 tenaga linmas tersebut terdiri dari 648 orang merupakan tenaga linmas desa/kelurahan, 1.062 orang Satgas linmas TPS dan Satgas linmas Kecamatan sebanyak 44 orang. Sedangkan pada tahun 2012 tidak ada penambahan tenaga Linmas di Kabupaten Manggarai.

Rasio perkembangan jumlah Linmas di Kabupaten Manggarai sejak tahun 2009-2016 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Tahun 2010 s/d 2016 Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Linmas	1.956	1.956	1.956	1.714	1.697	1.200	324
2.	Jumlah Penduduk	292.037	302.781	323.897	332.560	337.286	338.324	344.159
Rasio Jlh Linmas Per 10.000 Penduduk		1 : 67	1 : 65	1 : 60	1 : 52	1:50	1:35	1:9

b. Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Program JAMKESDA

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar masyarakat. Masyarakat yang sehat merupakan salah satu ciri kesejahteraan. Dan kesejahteraan merupakan salah unsur penting dari visi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Unsur kesehatan merupakan salah satu misinya.

Program Jamkesda merupakan salah satu program yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan. Pada tahun 2015, jumlah orang atau masyarakat yang terlayani Program JAMKESDA sebanyak 348

orang dengan 348 rekomendasi. Pada Tahun 2016, jumlah orang atau masyarakat yang terlayani Program JAMKESDA sebanyak 668 orang dengan 668 rekomendasi. Persentase capaian kinerja dari indikator sasaran ini mencapai 99,43%. Pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tingginya pengguna program JAMKESDA sehingga Pemda Kabupaten Manggarai mengambil kebijakan bahwa setiap satu orang pasien hanya boleh mendapat dan menggunakan satu kali rekomendasi Jamkesda.

Tabel 3.25
Alokasi Anggaran Program JAMKESDA
Kabupaten Manggarai
Tahun 2011-2016

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Jumlah Orang yang terlayani
1.	2011	1.245.000.000,-	1.200.000.000,-	900 Orang
2.	2012	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-	951 Orang
3.	2013	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-	998 Orang
4.	2014	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	959 Orang
5.	2015	812.899.914,-	812.899.914,-	348 Orang
6.	2016	1.363.660.330	1.363.660.330	668 orang
Jumlah		7.321.560.244	7.276.560.244	5.528 Orang

Tabel diatas menunjukan bahwa dalam kurun waktu 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7.276.560.244,- untuk melayani 5.528 orang pasien JAMKESDA. Alokasi anggaran yang cukup besar ini menunjukan adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk membantu masyarakat kurang mampu/ miskin dalam pelayanan kesehatan.

c. **Indikator Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas atau Crime Rate (CR) adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Atau dengan kata lain bahwa CR adalah ratio (perbandingan) antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Makin tinggi CR suatu wilayah maka makin tinggi pula tingkat kerawanan suatu daerah. Data dari Badan Kesbangpol dan Linmas

menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 terdapat 189 kasus, dengan rincian: masalah tanah 4 kasus, pembunuhan 2 kasus, pembakaran rumah 1 kasus, bencana alam 4 kasus, pemerkosaan/perzinahan 7 kasus, perjudian 22 kasus, penipuan 12 kasus, penganiayaan 83 kasus, KDRT 7 kasus, pencurian 41 kasus dan pengrusakan 6 kasus.

Dari target 11,67%, realisasi sebesar 5,49% dengan tingkat capaian 152,94% dengan kategori **MEMUASKAN**.

d. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Manggarai

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai telah membentuk Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pembentukan forum ini sebagai wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh melalui kerjasama Pemkab Manggarai dengan unsur KOMINDA (*yang terdiri dari TNI, POLRI, KEJAKSAAN, POL-PP, FKDM LINMAS*), Camat, Kepala Desa/Lurah, serta tokoh masyarakat, tokoh adat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, baik yang berkaitan dengan konflik tanah antara suku, orang perorangan dan penyakit masyarakat lainnya. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, dan pemantauan secara individu maupun secara bersama.

Pemerintah Kabupaten Manggarai juga senantiasa berupaya menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat berlandaskan iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan ini memiliki makna bahwa segala gerak langkah pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan senantiasa diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Usaha ini dilakukan dengan pemantauan dan pembinaan oleh tokoh agama yang tergabung forum komunikasi/kerukunan antar umat beragama. Indikator persentase kasus gangguan Ketertiban, Ketentraman, Keindahan di masyarakat mencapai 100% dari target 100% dengan kategori **MEMUASKAN**.

e. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Manggarai

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Manggarai bertekad untuk menerapkan akuntabilitas kinerja pada setiap Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar setiap Pimpinan Perangkat Daerah tidak lagi berorientasi pada menghabiskan anggaran dan menghasilkan kinerja *output*, akan tetapi berorientasi pada *outcome* atau *hasil*. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), maka Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi penerapan SAKIP untuk menilai implementasi dan perkembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Hasil evaluasi penerapan SAKIP Pemkab Manggarai terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014, untuk pertama kalinya Kabupaten Manggarai memperoleh predikat ‘CC’ dengan nilai 51,98 dari 39,40 tahun sebelumnya. Kenaikannya sebesar 12,58. Komponen yang mengalami kenaikan cukup besar disumbang dari Pengukuran Kinerja yaitu sebesar 7,17 point. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah melakukan reviu terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan IKU Kabupaten lalu diikuti oleh Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 2,54 point, Pelaporan 1,37 point, Evaluasi 2,33 point serta Komponen Capaian Kinerja 0,06 point. Sejak itu pula tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai terus meningkat sebesar 3,41% sampai dengan Tahun 2016 saat ini.

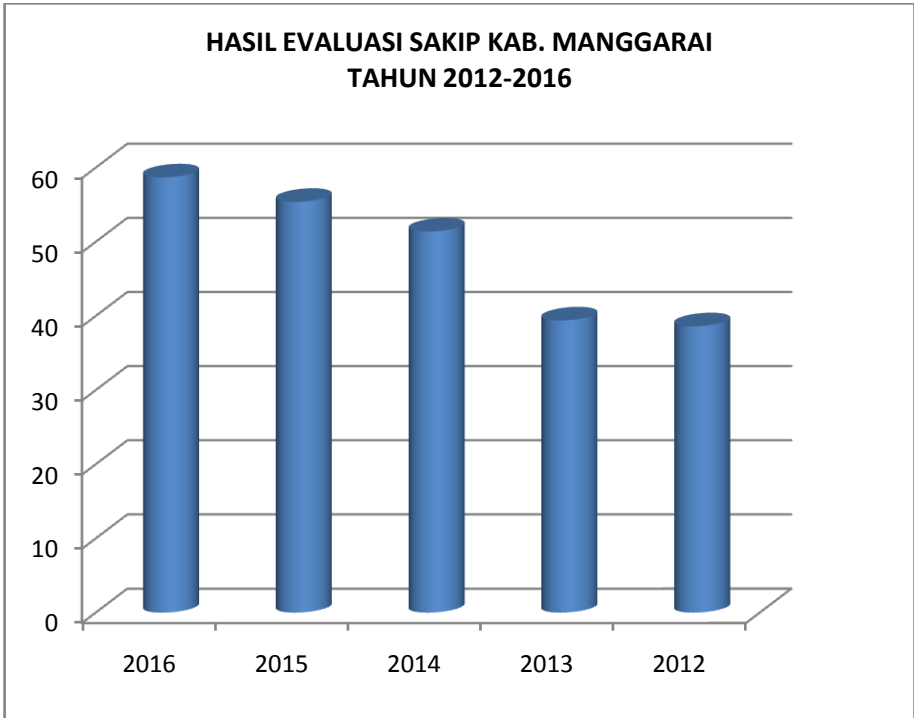
Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai 58,69 dengan Kategori ‘CC’ dengan persentase 94,28%. Indikator ini didukung anggaran sebesar Rp. 265.429.500 untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemda dan Laporan Kinerja Setda serta membiayai Kegiatan BIMTEK SAKIP untuk 100 orang peserta yang telah dilaksanakan Bulan Mei 2016.

Ada Komponen Kinerja seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.26
 Hasil Penilaian SAKIP
 Kabupaten Manggarai
 Tahun 2012 -2016

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Perencanaan kinerja	30	14,04	17,37	19,91	19,12	19,41
2	Pengukuran kinerja	25	9,46	3,46	10,63	10,84	12,81
3	Pelaporan kinerja	15	5,59	6,40	7,35	9,24	9,73
4	Evaluasi kinerja	10	1,95	3,00	4,61	5,32	5,59
5	Capaian kinerja	20	7,57	9,17	9,48	10,88	11,15
Nilai Hasil Evaluasi		100	38,61	39,40	51,98	55,39	58,69
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			C	C	CC	CC	CC

Grafik 3.20



Pemerintah Kabupaten Manggarai terus melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi dari Kementrian PAN dan RB. Pemerintah Kabupaten Manggarai juga berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan akuntabilitas kinerja serta

mutu pelayanan kepada masyarakat. Langkah langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan terutama terkait dengan tujuan dan sasaran agar lebih berorientasi outcome dan indikator kinerja agar relevan, terukur dan cukup mengukur sasaran strategis. Disamping itu perlu memperhatikan keselarasan antar dokumen.
2. Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan strategis pada penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselarasan antara sasaran dan indikator dengan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK) secara berkala, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah bahkan sampai pada unit kerja terendah.
4. Melakukan reviu dan penyempurnaan atas indikator kinerja utama (IKU) baik pada tingkat Kabupaten maupun Perangkat Daerah.
5. Memanfaatkan IKU dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja baik pada tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Perangkat Daerah.
6. Menyempurnakan penyajian analisis dan perbandingan kinerja pada LKjIP yang akan datang, sehingga menggambarkan capaian, kemajuan dan posisi kinerja atau prestasi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.
7. Menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang khusus berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang sesuai dengan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan manajemen kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas dan mengarahkan program dan kegiatan dalam usaha mewujudkan sasaran.

9. Meningkatkan kualitas evaluasi atas program sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan ataupun kegagalan suatu program dan hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kabupaten Manggarai.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada table berikut :

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	9,41	40	23,53
Jumlah masyarakat yang terlayani dengan program JAMKESDA	668	500	133,60
Angka kriminalitas	5,49	2,19	-50,68
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Manggarai	100	100	100,00
Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Manggarai	CC (58,69)	A (89)	65,94
RATA-RATA			54,48
KATEGORI			CUKUP BAIK

33. Capaian Sasaran 33

MENINGKATNYA PELAYANAN BENCANA

Bencana (*disaster*) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Memperhatikan topografi Kabupaten Manggarai, wilayah ini sangat rentan terhadap ancaman bencana. Jenis-jenis bencana yang sering ada dan yang terjadi pada Tahun 2016 di Kabupaten Mangarai adalah:

1. Bencana banjir

Kabupaten Manggarai memiliki 12 sungai yang berpotensi banjir yang tersebar di beberapa kecamatan. Pada Tahun 2016, terdapat 17 kejadian yang diakibatkan oleh bencana banjir.

2. Tanah longsor

Kabupaten Manggarai berada pada kemiringan tanah sekitar 70,45% dan kemiringan lokasi 40⁰. Kondisi tersebut sangat rawan terhadap bencana tanah longsor. Pada Tahun 2016 terdapat 83 kejadian yang diakibatkan oleh tanah longsor.

3. Hujan deras dan angin kencang

Bencana hujan deras dan angin kencang/angin puting beliung mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat dan fasilitas umum sejumlah 17 kejadian.

4. Bencana kebakaran

Bencana yang setiap tahun terjadi adalah kebakaran dan pada tahun 2016 jumlah kasus kebakaran adalah 20 kejadian.

5. Bencana sosial lainnya

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Dan pada tahun 2016 terdapat dua kejadian yakni dua korban yang tenggelam di Wae Lega Kecamatan Rahong Utara.

Kelima jenis bencana di atas tentu membawa korban baik korban jiwa maupun harta benda. Tabel berikut menggambarkan dampak dari bencana yang terjadi :

NO.	JENIS BENCANA	JML KEJADIAN	DAMPAK BENCANA		
			UNIT	KK	KORBAN JIWA
1.	Hujan dan angin kencang	17	33	153	676
2.	Tanah longsor	83	175	740	963
3.	Kebakaran	20	24	24	103
4.	Banjir dan gelombang pasang	17	-	-	17
5.	Bencana sosial	2	-	-	2
TOTAL		139	260	1.203	2.001

Tantangan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemkab Manggarai terkait bencana adalah :

- Sebagian besar wilayah (70,45%) berada pada kemiringan di atas 40⁰.
- Tingginya curah hujan yaitu 9 bulan basah dan 3 bulan kering yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor.

- Abrasi pantai yang cukup tinggi.
- Illegal logging.
- Kabupaten Manggarai termasuk dalam kawasan Circum-Pasifik sehingga memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan).
- Terbatasnya sarana dan prasarana.
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan jika dibandingkan dengan jumlah kejadian bencana.

Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan antara lain :

- Melakukan sosialisasi bencana baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- Memasang rambu-rambu peringatan dini bencana.
- Pelatihan manajemen kebencanaan bagi aparatur dan komponen masyarakat pengelola masalah kebencanaan.
- Penyusunan peta daerah rawan bencana serta penyusunan profil kebencanaan.
- Mengeluarkan himbauan maupun instruksi kepada masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, masyarakat dan swasta.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan tugas tidak terhambat.

Upaya yang dilakukan pada saat bencana :

- Mengaktifkan posko pemantauan bencana selama 1x24 jam.
- Menyalurkan bantuan emergency kepada para korban berupa makanan, pakaian dan air bersih.
- Melakukan kegiatan pencarian dan evakuasi terhadap para korban bencana.
- Menyiagakan mobil dapur umum lapangan serta personil Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas posko bencana, petugas logistic dan petugas penyelenggara dapur umum lapangan di lokasi bencana.

Upaya penanggulangan bencana :

- Melakukan koordinasi penghitungan jumlah kerugian yang timbul akibat bencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Menyalurkan bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) bagi para korban bencana.
- Menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada para korban bencana.

Sasaran ini didukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.228.800.537,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.100.671.687,- atau 96,97%.

Realisasi kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

SASARAN 33

MENINGKATNYA PELAYANAN BENCANA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat waktu tanggap (<i>responsive time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen bencana			
- waktu tanggap : 1 X 24	1 x 24	1 x 24	100
- Penanganan darurat : 3 X 24	3 x 24	3 x 24	100
- Waktu perbaikan: 14x24	14 x 24	14 x 24	100
RATA-RATA			100
KATEGORI			MEMUASKAN

Penanggulangan darurat bencana atau tanggap darurat (*emergency response*) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Bantuan darurat (*relief*) adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori MEMUASKAN. Capaian ini diperoleh dari kejadian bencana pada tahun 2016 semuanya dilakukan tanggap darurat.



Jika dibandingkan dengan Target RPJMD, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

MENINGKATNYA PELAYANAN BENCANA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI Thn 2016	TARGET RPJMD	CAPAIAN (%)
Tingkat waktu tanggap (<i>responsive time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen bencana			
- Waktu tanggap : 1 X 24	1 x 24	1 x 24	100
- Penanganan darurat : 3 X 24	3 x 24	3 x 24	100
- Waktu perbaikan: 14x24	14 x 24	14 x 24	100
RATA-RATA			100
KATEGORI			MEMUASKAN

D. REALISASI KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah sebagai penjabaran Panca Program Pembangunan Kabupaten Manggarai yang berisikan langkah-langkah strategis dan prioritas pembangunan daerah dan dicerminkan ke dalam biaya setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga memiliki daya ungkit untuk mendorong perekonomian daerah. APBD juga dapat dipandang sebagai investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan dimaksud tentu tidak

berorientasi pada profit atau keuntungan tetapi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu juga menjadi tanggungjawab bersama para pihak seperti pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kondisi riil di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa investasi sektor swasta dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbatas. Bersamaan dengan itu masyarakat juga belum mampu membiayai sendiri kehidupannya. Masyarakat masih membutuhkan intervensi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam banyak hal seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian maka peran Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui APBD menjadi semakin dominan dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah berikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Manggarai belum mampu membiayai seluruh urusan pemerintahan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran/APBD harus benar-benar dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, demokratis dan akuntabel. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrument yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu APBD hendaknya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan akan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan daerah juga dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, tingkat ketergantungan fiskal, realisasi belanja yang menggambarkan tentang keterkaitan aspek perencanaan dan penganggaran serta bagaimana pengelolaan kas telah dilakukan untuk menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efisien dan efektif. Karena itu pengelolaan keuangan daerah mencakup 3 (tiga) aspek keuangan daerah yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rasio pendapatan, belanja dan pembiayaan menggambarkan bagaimana wujud pengelolaan keuangan daerah dimaksud. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2016, termuat dalam RKPD tahun 2016.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut : *(Data keuangan khusus tahun anggaran 2016 yang disajikan dalam laporan ini adalah data sementara atau unaudited yang bersumber dari Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai).*

APBD Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.158.175.203.603,00 (APBD Perubahan) dengan rincian realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.127.125.467.633,33 dan realisasi belanja sebesar Rp.1.172.402.129.150 sehingga terjadi defisit sebesar Rp.45.276.661.516,67.

Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.58.619.290.842,85 yang terdiri dari realisasi penerimaan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.58.495.764.680,85 dan realisasi penerimaan kembali pinjaman daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.123.526.162,00 dan Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 4.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Dari realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.127.125.467.633,33, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp.78.666.667.133,33 atau 90,73% dari target PAD setelah perubahan sebesar Rp.86,701.816.448,00.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
4. Mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai selama tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Perkembangan PAD
Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)	Ket.
2011	32.749.310.197,00	29.920.862.981,64	511.195.287.261,00	5,85%	Audited
2012	40.205.313.554,00	38.170.094.216,25	544.396.766.054,00	7,01%	Audited
2013	47.515.519.487,00	46.866.790.827,00	644.734.062.774,00	7,27%	Unaudited
2014	68.507.799.885,00	64.487.636.691,26	768.966.206.570,52	8,4%	Unaudited
2015	76.721.851.980,00	75.009.754.682,33	1.027.437.000.687,00	7,30%	Unaudited
2016	86.701.816.448,00	78.666.667.133,33	1.127.125.467.633,33	6,98	Unaudited

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Manggarai Tahun 2016

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya penurunan realisasi PAD tahun 2015 dari 97,77% menjadi 90,73% pada tahun 2016 dan penurunan proporsi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Realisasi PAD tahun 2016 adalah Rp. 78.666.667.133,33 dari target Rp. 86.701.816.448,00 atau capaian 90,73% serta proporsi terhadap APBD mencapai 6,98%. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kabupaten Manggarai. Dalam 6 (enam) tahun terakhir Dana perimbangan Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Perkembangan Dana Perimbangan
Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016

Tahun	Dana Perimbangan	(%)	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)	Ket.
2011	476.720.281.001,00		511.195.287.261,00	93,26%	Audited

2012	504.944.013.279,12	5,92%	544.396.766.054,00	92,75%	Audited
2013	616.329.552.997,00	22,06%	644.734.062.774,00	95,59%	Unaudited
2014	627.007.693.138,13	1,73%	768.962.156.570,52	81,54%	Unaudited
2015	749.283.597.068,00	19,50%	1.027.437.000.687,00	72,93%	Unaudited
2016	818.676.743.696,00	9,26%	1.127.125.467.633,33	72,63%	Unaudited

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Manggarai Tahun 2016

Pada tahun 2015 Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai sebesar Rp.749.283.597.068,00 dan Tahun 2016 naik menjadi Rp. 818.676.743.696,00 atau 9,26%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2016, lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Kabupaten sebesar Rp.229.782.056.804,00 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.4.736.570.150,00, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.19.430.229.227,00, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.113. 819.738.427,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp.243.000.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp.91.552.519.000,00 Untuk lebih jelas target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.) <i>Unaudited</i>	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	1.158.175.203.603,00	1.127.125.467.633,33	97,32
1.	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<i>86.701.816.448,00</i>	<i>78.666.667.133,33</i>	<i>90,73</i>
a.	Pendapatan Pajak Daerah	21.234.846.300,00	21.015.233.246,52	98,97
b.	Hasil Retribusi Daerah	6.896.395.170,00	4.968.400.156,00	72,04
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.360.000.000,00	7.012.577.839,00	83,88
d.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.210.574.978,00	45.670.455.891,81	90,96
2.	<i>DANA PERIMBANGAN</i>	<i>888.356.460.000,00</i>	<i>818.676.743.696,00</i>	<i>92,16</i>

3.	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	13.079.581.000,00	14.475.339.359,00	110,67
	b. Dana Alokasi Umum	575.280.999.000,00	575.280.999.000,00	100,00
	c. Dana Alokasi Khusus	299.995.880.000,00	228.920.405.337,00	76,31
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	183.116.927.155,00	229.782.056.804,00	125,48
	a. Hibah	5.000.000.000,00	4.736.570.150,00	94,73
	b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya	19.837.208.155,00	19.430.229.227,00	97,95
	c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	66.169.200.000,00	113.819.738.427,00	172,01
	d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	558.000.000,00	243.000.000,00	43,55
	e. Dana Desa	91.552.519.000,00	91.552.519.000,00	100,00

Apabila kita melihat seberapa besar peran/kontribusi setiap komponen pendapatan daerah maka dapat disimpulkan bahwa peranan PAD hanya sebesar 6,98% dalam pembentukan total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016. Sementara itu kontribusi dana transfer (Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) tetap merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan total pendapatan yaitu sebesar 92,16%. Dengan demikian ke depan tentunya Pemerintah Kabupaten Manggarai masih sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat maupun Propinsi untuk memenuhi *fiskal gap* dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pembangunan daerah ini. Diharapkan ke depan peran PAD juga dapat menjadi penopang utama dalam pembiayaan pembangunan di daerah ini.

1. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk diketahui, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) tahun terakhir yakni sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Kabupaten Manggarai "Wajar Dengan Pengecualian".

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin kegiatan-kegiatan strategis tetap bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Upaya yang dilakukan secara umum adalah pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisiensi dan efektif serta penggunaan belanja langsung disesuaikan dengan keadaan riil di lapangan.

2. Target dan Realisasi Belanja

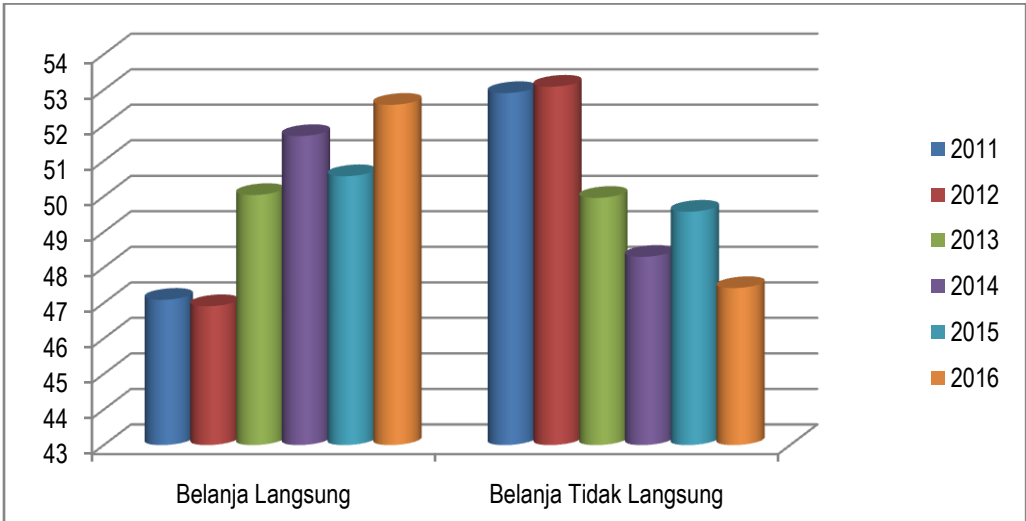
Pada tahun 2013-2016, proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan sebaliknya dari tahun 2011-2012 proporsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Proporsi (%)	Belanja Langsung	Proporsi (%)
2011	289.334.379.427,00	52,91%	257.555.037.807,00	47,09%
2012	313.320.756.364,63	53,09%	276.794.991.774,00	46,91%
2013	345.704.353.049,00	49,96%	346.269.352.800,00	50,04%
2014	358.758.195.371,00	48,30%	383.972.756.381,00	51,70%
2015	507.884.915.534,00	49,43%	519.552.085.153,00	50,57%
2016	575.161.253.335,85	47,42%	637.633.241.110,00	52,58%

Adapun proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

Diagram
 Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan
 Belanja Langsung (BL) dalam APBD
 Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016



Untuk lebih jelas target dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31
 Target dan Realisasi Belanja Daerah
 Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran 2016(Rp)	Realisasi 2016 (Rp) Unaudit	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN		1.158.175.203.603,00	1.127.125.467.633,33	97,32
BELANJA TIDAK LANGSUNG		575.161.253.335,85	553.399.368.712,00	96,22
1	Belanja Pegawai	412.181.115.601,85	390.695.055.736,00	94,79
2	Belanja Hibah	6.391.000.000,00	6.389.278.736,00	94,79
3	Belanja Bantuan Sosial	845.000.000,00	697.500.000,00	82,54
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	153.879.837.590,00	153.879.522.453,00	100
5	Belanja Tidak Terduga	1.864.300.144,00	1.737.961.673,00	93,22
BELANJA LANGSUNG		637.633.241.110,00	619.002.760.438,00	97,08
1	Belanja Pegawai	48.174.686.716,00	44.377.751.436,00	92,12
2	Belanja Barang dan Jasa	272.394.805.898,00	284.159.722.724,00	104,32
3	Belanja modal	317.063.748.496,00	290.465.286.278,00	91,61
PEMBIAYAAN DAERAH		58.619.290.842,85	60.199.167.270,85	102,70
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. Sebelumnya	58.495.764.680,85	60.137.183.890,85	102,81
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	123.526.162,00	61.983.380,00	50,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		4.000.000.000,00	3.999.000.000,00	99,98
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	3.999.000.000,00	99,98
PEMBIAYAAN NETTO		54.619.290.842,85	56.200.167.270,85	102,89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN THN BERKENAN (SILPA)		0,00	10.923.505.754,18	0,00

2. Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Perkembangan Pembiayaan
Kabupaten Manggarai Tahun 2011-2016

Tahun	Penerimaan	r (%)	Pengeluaran	r (%)
2011	38.867.210.016,99		4.000.000.000,00	
2012	49.718.982.084,63	27,92%	4.000.000.000,00	0,00%
2013	33.767.062.427,00	-32,08%	7.000.000.000,00	75,00%
2014	42.334.846.906,00	25,37%	9.750.000.000,00	39,29%
2015	65.344.618.053,00	54,35%	6.000.000.000,00	-38,46%
2016	58.619.290.842,85	-10,29	4.000.000.000,00	-33,33

Pada tahun 2015, penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan 54,35% dan pengeluaran daerah dalam pembiayaan mengalami penurunan sebesar (38,46%). Sedangkan pada tahun 2016 penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar(10,29 %) dan pengeluaran daerah dalam pembiayaan mengalami penurunan sebesar (33,33 %).

3. Permasalahan dan Solusi Keuangan Daerah

Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Untuk peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan dari pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan tidak menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan asli daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila

dikaitkan dengan pembelanjaan, maka pendapatan asli daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai. Upaya peningkatan PAD dicapai dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Program intensifikasi dilakukan melalui upaya secara terus menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan sarana prasarana yang ada seperti saat ini. Untuk itu difokuskan pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan PAD dapat ditunjang pula dengan optimalisasi aset-aset daerah agar dapat bernilai jual tinggi. Pengelolaan pendapatan daerah lebih mengoptimalkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah baik dengan provinsi maupun dengan pusat.
- d. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 terhadap realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu target yang direncanakan sebesar Rp.1.158.175.203.603,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.127.125.467.633,33 atau mencapai 97,32%.

4. Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan tuntutan perubahan yang terjadi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka arah dan kebijakan umum Pendapatan Daerah tahun 2016 sesuai KUA-PPAS Tahun 2016 adalah :

- a. Terlaksananya kebijakan anggaran pendapatan daerah secara optimal, baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah.
- b. Peningkatan penerimaan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah terdata maupun yang potensial.
- c. Terdatanya subyek dan obyek pajak serta retribusi daerah yang realistis sesuai potensi yang ada.
- d. Optimalisasi pemanfaatan asset/kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD.
- e. Peningkatan pelayanan publik melalui dinas-dinas operasional hendaknya berdampak pada penerimaan daerah.
- f. Pengkajian Pendapatan Daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi dana perimbangan.

5. Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah

Penentuan strategi dan prioritas Pendapatan daerah mengacu pada penentuan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah. Agar Arah dan Kebijakan Umum dapat tercapai maka perlu ditetapkan strategi dan prioritas pendapatan daerah dengan menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Mengembangkan obyek pungutan Pajak dan retribusi daerah.
- c. Mendorong semua unit kerja yang mengelola penerimaan dari kelompok PAD untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- d. Penyiapan/pembaharuan data dukung dan indikator untuk perhitungan DAU Tahun anggaran 2016.
- e. Peningkatan pengelolaan asset daerah

- f. Tambahan penyertaan Modal pada BANK NTT untuk meningkatkan perolehan Deviden bagi daerah.
- g. Mengajukan rancangan Perda baru tentang beberapa pungutan, baik pajak maupun retribusi daerah kepada DPRD sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Kondisi Umum Belanja Daerah

Secara objektif masih banyak masalah dan tantangan yang harus di selesaikan dan menjadi prioiritas dalam Tahun 2016 tetapi di lain pihak kondisi dan kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran masih terbatas, sehingga prinsip *efisiensi, efektivitas, equity* dan *ekonomis* tetap menjadi dasar dalam pengalokasian belanja daerah tentunya dengan memperhatikan tolok ukur dan target kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Komposisi belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 sebagai berikut:

Urusan Wajib meliputi :

- a. pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga);
- b. kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD);
- c. lingkungan hidup (Badan Lingkungan Hidup Daerah);
- d. pekerjaan umum (Dinas Pekerjaan Umum);
- e. penataan ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA);
- f. perencanaan pembangunan (BAPPEDA);
- g. perumahan (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
- h. kepemudaan dan olahraga (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga);
- i. penanaman modal (BAPPEDA);
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah (Dinas Perindagkop);

- k. kependudukan dan catatan sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
- l. ketenagakerjaan (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
- m. ketahanan pangan (BP2KP);
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Badan KB dan PP);
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera (Badan KB dan PP);
- p. perhubungan (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika);
- q. komunikasi dan informatika (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika);
- r. pertanahan (Bagian Adm. Pemerintahan dan PPKAD);
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (Badan KESBANGPOL LINMAS dan SATPOL PP);
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepagawaian Daerah dan Dinas PPKAD);
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa (Badan PMPD);
- v. sosial (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
- w. kebudayaan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
- x. statistik (BAPPEDA bekerjasama dengan BPS);
- y. kearsipan (Badan perpustakaan dan Arsip Daerah) dan
- z. perpustakaan (Badan perpustakaan dan Arsip Daerah).

Urusan Pilihan meliputi :

- a. Pertanian (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura);
- b. Perdagangan (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) ;
- c. Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Pertambangan dan Energi);
- d. Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan);
- e. Perindustrian (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi);
- f. Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan);
- g. Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
- h. Ketransmigrasian (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Permasalahan Utama Belanja Daerah

Secara umum permasalahan utama Belanja Daerah bermula dari kelangkaan sumber daya atau tingginya selisih antara besarnya jumlah biaya yang dibutuhkan dengan besarnya jumlah sumber daya yang dimiliki. Menyikapi persoalan di atas diharapkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah hendaknya memperhatikan sungguh perlakuan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang terencana, terarah pada kegiatan-kegiatan berdaya guna dan berhasil guna untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh Manggarai.

Disadari pula bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika tidak dibarengi dengan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat justru akan dapat menciptakan kerentanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat, sebagai sisi lain dari perwujudan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas, merupakan sebuah pilihan yang bijaksana, dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangannya harus benar-benar didasarkan kepada kondisi dan potensi riil yang dimiliki oleh masyarakat kita sendiri, sehingga dalam proses implementasinya, setiap program yang dikembangkan harus dapat bersentuhan langsung dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan ke depan, setiap periodisasi pencapaian tujuan daerah dan aktivitas Pemerintah Daerah, haruslah senantiasa tetap berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan orientasi dan pertanggungjawaban yang jelas maka tujuan makro pembangunan daerah akan tercapai.